



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE TERHADAP
PENURUNAN POPULARITAS PRESIDEN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO**

**(Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet
Bersatu Jilid II di situs detikNews)**

SKRIPSI

ANNA OKTAVIA SARAGIH

0906612831

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK**

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE TERHADAP
PENURUNAN POPULARITAS PRESIDEN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO**

**(Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet
Bersatu Jilid II di situs detikNews)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial**

ANNA OKTAVIA SARAGIH

0906612831

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN KOMUNIKASI MASSA
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Anna Oktavia Saragih

NPM : 0906612831

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Anna Oktavia Saragih
NPM : 0906612831
Program Studi : Komunikasi Massa
Judul Skripsi : Peningkatan Media Online Terhadap Penurunan Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II di situs detikNews)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

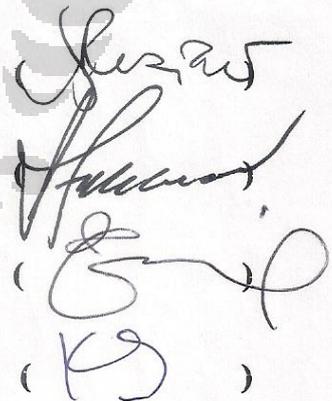
DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Askariani B. Hidayat, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA

Ketua Sidang : Drs. H. Harun Sanif

Sekretaris Sidang : Kinkin Yuliaty Subarsa P. S.Sos, M.Si



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including Dra. Askariani B. Hidayat, Prof. Dr. Harsono Suwardi, Drs. H. Harun Sanif, and Kinkin Yuliaty Subarsa P. S.Sos, M.Si.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang membimbing dan menguatkan saya, juga kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Askariani B. Hidayat, M.Si, selaku Pembimbing sekaligus Ketua Program Ekstensi Departemen Ilmu Komunikasi, atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing. Semangat dan perhatian *mba* mampu membangkitkan motivasi penulis, untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, selaku penguji ahli, Drs. H. Harun Sanif selaku ketua sidang, dan Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si, selaku sekretaris sidang. Terima kasih atas masukan yang diberikan selama sidang skripsi.
3. Kedua orang tua Pdt.Liharman Saragih, STh dan Relly Manik, juga adik-adik tercinta Ian, Gladia dan Gindo serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa dan dorongan semangat.
4. Dra. Martini Mangkoedipoero, M.Si, selaku Sekretaris Program dan semua staff Program Ekstensi Komunikasi Massa yang telah membantu.
5. Teman-teman Ekstensi Komunikasi Massa 2009 khususnya penyetaraan 36, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

Penulis berharap semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu.

Depok, 23 Desember 2011

Anna Oktavia Saragih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Oktavia Saragih
NPM : 0906612831
Program Studi : Komunikasi Massa
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

Pembingkaihan Media Online terhadap Penurunan Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II di Situs DetikNews)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Anna Oktavia Saragih)

ABSTRAK

Nama : Anna Oktavia Saragih
Program Studi : Komunikasi Massa
Judul : Pembingkai Media Online terhadap Penurunan Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II di Situs DetikNews)

Media online memiliki peranan penting dalam memonitor kinerja pemerintah, dengan meliput kinerja mereka dan menyebarkannya kepada publik melalui berita. Pembingkai media terhadap berita tersebut saling berbeda, karena pengaruh faktor internal dan eksternal media. Sehingga seringkali frame media memuat unsur-unsur lain yang menggambarkan sesuatu secara implisit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepemimpinan presiden SBY melalui framing pemberitaan tentang reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif, strategi social konstruktivisme dengan menggunakan model analisis Robert N. Entman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa detikNews melakukan pembingkai atas penurunan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak pada kualitas kepemimpinannya. Dari keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa detikNews menggambarkan perannya sebagai *guard dog*.

Kata kunci: Framing, Kepemimpinan, detikNews

ABSTRACT

Name : Anna Oktavia Saragih
Study Program : Mass Communication
Title : Online Media Framing of The President Susilo Bambang Yudhoyono Popularity Decline
(Framing Analysis of The Bersatu Cabinet Part II Reshuffle News on detikNews Portal)

Online media play an important role in monitoring government performance, by covering their performance and disseminate it to the public through the news coverage. The media frames the news differently. It depends on the influence of its internal and external factors. Therefore, the media framing often contains other elements that describe something implicitly.

The purpose of this study is to examine detikNews framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership through its coverage on the cabinet reshuffle news. This study used qualitative approach, the constructivism paradigm, and the social constructivism as the research strategy. The method was used to analyze the media framing was Robert N. Entman framing model.

The result reveals on its media framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono popularity decline, detikNews paying more attention to the decline of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership quality. Overall, this research found that detikNews has played its role as a guard dog.

Keywords : Framing, Leadership, detikNews

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Ideologi Media	10
2.2 Media online	11
2.3 Jurnalisme Online	12
2.4 Framing	13
2.5 Priming.....	15
2.6 Komunikasi Politik	16
2.7 Peran Media Massa	18
2.8 Kepemimpinan	20
2.8.1 Pendekatan Kepemimpinan.....	21
2.8.2 Tipe Kepemimpinan.....	22
2.8.3 Gaya Kepemimpinan	23
2.9 Bahasa Politik	25
2.10 Konteks Kultural Komunikasi	26
2.11 Popularitas.....	28
2.12 Reshuffle Kabinet	28
2.13 Asumsi Teoritis	29
BAB 3 METODOLOGI.....	30
3.1 Paradigma Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian.....	31
3.3 Sifat Penelitian.....	32
3.4 Strategi Penelitian.....	32
3.5 Unit Observasi	33
3.6 Unit Analisis	33
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.8 Alasan Pemilihan Unit Analisis.....	34
3.9 Metode Analisis Data.....	35
3.10 Keabsahan Penelitian	38
3.11 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian	38

3.11.1 Kelemahan Penelitian	38
3.11.2 Keterbatasan Penelitian.....	39
BAB 4 PROFIL MEDIA ONLINE.....	40
4.1 detik.com sebagai Situs Jurnalisme Online	40
4.2 Tampilan Situs detik.com	42
BAB 5 ANALISIS HASIL TEMUAN DATA BERDASARKAN PEMBINGKAIAN MEDIA	44
5.1 Analisis Pembungkaihan Penurunan Popularitas Presiden SBY dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet oleh detikNews	44
5.1.1 Berita: Reshuffle, Siapa Bermasalah? Sang Menteri, dari Korupsi Hingga Selingkuh.....	44
5.1.2 Berita : Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah.....	49
5.1.3 Proses Reshuffle Terlalu Panjang Bak Sinetron	53
5.1.4 Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY	56
5.1.5 Berita: Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY? Tak Ada Harapan dari Paradoks Presiden	59
5.2 Pembungkaihan terhadap Keseluruhan Pemberitaan detikNews mengenai Penurunan Popularitas Presiden SBY	63
5.3 Analisis respon publik tentang penurunan popularitas Presiden SBY dinilai dari kepemimpinannya pada pelaksanaan reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews.....	64
BAB 6 DISKUSI HASIL PENELITIAN.....	67
BAB 7 PENUTUP.....	72
7.1 Kesimpulan	72
7.2 Implikasi Penelitian	73
1. Implikasi Akademik.....	73
2. Implikasi Praktis	73
7.3 Rekomendasi Penelitian.....	73
1. Rekomendasi Akademik	73
2. Rekomendasi Praktis.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	xii
Artikel dan Respon Publik	

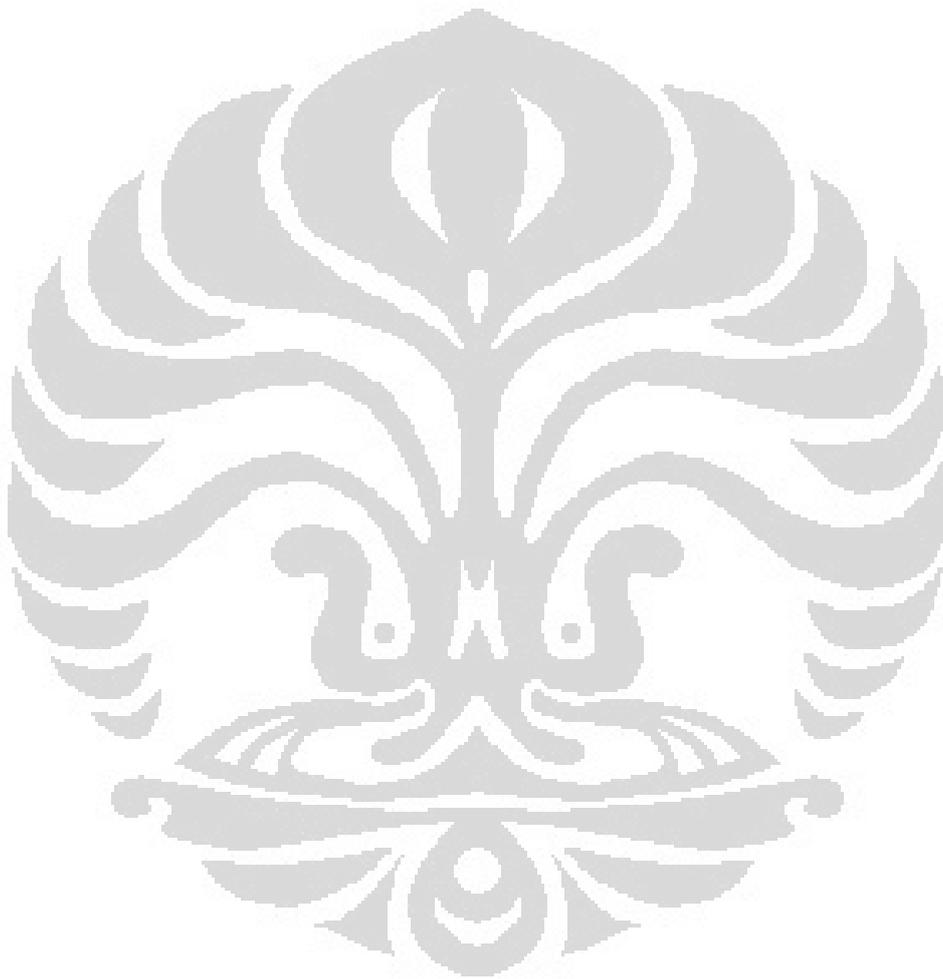
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unit Analisis dalam Situs Pemberitaan detikNews	33
Tabel 2 Elemen-elemen dalam Framing Entman.....	36
Tabel 3 Framing Entman Berita 1	46
Tabel 4 Framing Entman Berita 2.....	50
Tabel 5 Framing Entman Berita 3.....	54
Tabel 6 Framing Entman Berita 4.....	57
Tabel 7 Framing Entman Berita 5.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perilaku Kontinum Pemimpin.....	24
Gambar 2 Tampilan Situs Pemberitaan detik.com	42
Gambar 3 Tampilan Situs detikNews	42



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak di antara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi penghantar dalam menyebarkan berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya.¹

Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kemekaran media massa. Kecepatan berita menjadi salah satu aspek yang sangat penting, selain aspek lain seperti ketepatan dan keakuratan data. Dengan kemunculan dan perkembangan internet, maka publik dapat mengakses berita dan informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi tersebut, juga menimbulkan perubahan dan perkembangan dalam dunia jurnalistik dengan munculnya jurnalisme online, yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan mudah untuk diakses.

Dalam menayangkan sebuah berita, media online dan media konvensional memiliki karakteristik yang sama dalam proses penentuan nilai berita. Berita adalah laporan kejadian yang aktual, bermakna dan menarik.² Sebuah kejadian yang mempunyai unsur nilai paling tinggi pasti akan lebih diprioritaskan dibanding dengan peristiwa yang tidak memiliki nilai berita. Pendek kata, nilai berita bukan hanya menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan juga telah menjadi ideologi dari kerja wartawan, nilai berita memperkuat dan membenarkan wartawan kenapa peristiwa tersebut diliput sedangkan yang lain

¹Dennis McQuail, 1987, *Mass Communication Theory*, Second Edition, Penerjemah: Agus Dharma dan Aminuddin Ram, (Jakarta: Erlangga), hlm.51.

² Jakob Oetama, 2004, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm. 262.

tidak.³ Nilai berita menjadi *guide-line* untuk mengarahkan dan mendisiplinkan awak media ketika berhadapan dengan fakta atau informasi. Nilai berita merupakan asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka. Nilai berita yang dimaksud diantaranya adalah aktualitas (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), keterkenalan (*prominence*), dampak (*consequence*), dan *human interest*.⁴

Jurnalisme online, sebagai media baru yang muncul seiring perkembangan teknologi, memiliki kelebihan lain dibanding dengan media konvensional. Selain mengandalkan kecepatannya dalam memberikan dan mengupdate informasi terbaru, jurnalisme online juga memberikan ruang kepada publik untuk memberikan respon atas pemberitaan yang ada. Dengan media online, pembaca tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk membaca informasi, karena media online bisa dikonsumsi dimana saja. Khalayak penerima berita juga dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Hal ini berbanding terbalik dengan media konvensional, yang harus melalui proses panjang, hingga menjadi suatu bundelan sekumpulan informasi atau peristiwa.

Dalam proses pembuatan berita, para awak media mengemas dan membingkai aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar dan perangkat lainnya. Pembingkai (framing) adalah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari suatu realitas, akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mengena dalam pikiran masyarakat.⁵

Pembingkai media terhadap suatu isu/peristiwa yang sama saling berbeda, karena dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi media yang bersangkutan. Perbedaan tersebut terlihat dari pemilihan dan penggunaan kata, gambar, atau angle tulisan. Konstruksi realitas yang dilakukan media bisa dilihat melalui pemilihan narasumber, pemilihan narasi cerita, dan penonjolan nilai/bagian

³ Eriyanto, 2009, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Cetakan Keenam, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta), hlm.105.

⁴ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, 2005, Jurnalistik; Teori dan Praktik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.61-66.

⁵ Eriyanto, *Opcit*, hlm.3-4.

tertentu sesuai dengan kepentingan media tersebut. Pembingkaiannya tersebut juga dapat disebabkan karena faktor ekonomi politik media, yang mengejar *rate* yang tinggi serta untuk kepentingan penguasa dan pemilik modal yang kebanyakan bergelut di dunia politik.

Salah satu peristiwa yang banyak menyita perhatian publik dan media adalah pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan reshuffle kabinet. Berita tersebut mengandung berbagai nilai berita yang membuatnya menjadi pemberitaan yang sangat penting. Hampir seluruh media massa dihiasi dengan pemberitaan tentang reshuffle kabinet Bersatu Jilid II yang disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk mengangkat kembali popularitas presiden yang semakin menurun.

Menurut data survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 5-10 September 2011, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden SBY hanya 37,3 persen. Dalam perhitungan LSI, angka 37,7 dianggap tidak aman. Padahal saat dilantik 2 tahun lalu, Presiden SBY meraih kepercayaan hingga 52,3 persen. Survei tersebut dilakukan kepada 1.200 responden dengan metode *multistage random sampling* dengan *margin error* mencapai 2,9 persen.

Menurut survei tersebut, terdapat beberapa alasan dominan yang mendorong kepercayaan publik menurun. *Pertama*, masalah skandal korupsi terutama di Kemenpora dan Kemenakertrans. Kasus korupsi tersebut bertolakbelakang dengan keinginan pemerintah yang ingin memerangi korupsi, namun kasus tersebut terjadi di rumah sendiri. *Kedua*, didorong isu-isu negatif di masyarakat seperti maraknya ledakan tabung gas, remisi koruptor, perlindungan TKI dan kebebasan beragama. *Ketiga* adalah kinerja menteri yang dianggap tidak maksimal, khususnya di Kementrian Pertanian dan Kemenpera. *Keempat*, merujuk kepada alasan personal yakni skandal perselingkuhan yang menerpa Menhub, Menteri ESDM, dan Menpera. Publik menilai, menteri saja telah menipu istrinya, apalagi rakyat Indonesia yang sama sekali tidak punya hubungan emosional. *Kelima*, terkait dengan masalah kesehatan yang menimpa Menkes dan Menteri BUMN.⁶

⁶ Reshuffle, Siapa Bermasalah? Sang Menteri, dari Korupsi hingga Selingkuh. detikNews edisi 29 September 2011, 08:45 WIB. <http://www.detiknews.com/read/2011/09/29/084544/1732857/159/sang-menteri-dari-korupsi-hingga-selingkuh>. (diunduh 18 Oktober 2011, 15:06 WIB).

Berdasarkan survey LSI yang dilakukan pada 5-10 Oktober 2011, didapatkan data bahwa hanya 40,9 persen publik yang puas dengan kerja tim ekomomi dengan alasan harga sembako yang semakin sulit. Untuk kasus penegakan hukum, hanya 39,9 persen yang menyatakan puas karena banyaknya pemberitaan korupsi. Rapor merah lainnya kepemimpinan SBY adalah bidang politik yang hanya 38, 4 persen menyatakan puas, selebihnya mengeluh karena terbatasnya akses pemimpin di level Pilkada. Untuk isu luar negeri, terutama perlindungan TKI, sebanyak 44,8 persen masyarakat menilai kepemimpinan SBY tidak maksimal melindungi warganya yang menjadi buruh migran di luar negeri. Sebanyak 49,9 persen masyarakat juga tidak puas tentang isu-isu sosial seperti Ahmadiyah. Satu-satunya rapor biru kepemimpinan SBY adalah soal keamanan meskipun dengan catatan seperti terror bom di tempat ibadah.⁷

Menurut peneliti LSI Ardian Sopa, selain masalah diatas salah satu penyebab menurunnya popularitas SBY adalah kinerja Wakil Presiden Boediono yang terkesan lamban seperti SBY, tidak seperti Jusuf Kalla pada periode sebelumnya. Akibatnya, publik merasakan berbagai keputusan pemerintah yang sangat lamban.⁸ Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat serta kader-kader partai lainnya, cukup mempengaruhi penurunan citra SBY di mata masyarakat. Untuk menaikkan kembali popularitas tersebut, reshuffle kabinet dinilai sebagai salah satu jalan untuk menyelamatkan kepercayaan publik.

Lembaga lain yang melakukan survei terhadap popularitas SBY, mendapatkan hasil bahwa popularitas presiden memang menurun. Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang dikeluarkan Indo Barometer, persentase kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY hanya 48,9 persen, terutama bidang ekonomi (41,2 persen) dan hukum (46,7 persen). Ketidakpuasan terhadap masalah ekonomi disebabkan masih banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Survei tersebut

⁷ Survei LSI: Hanya 46,2 Persen yang Puas dengan kinerja SBY. detikNews edisi 16 Oktober 2010, 13:38 WIB. <http://us.detiknews.com/read/2011/10/16/133847/1745075/10/survei-lsi-hanya-462-persen-yang-puas-dengan-kinerja-sby> (diunduh 16 november 2011, 15:57 WIB)

⁸ Ari Saputra, 16 Oktober 2011, LSI: Gaya Kepemimpinan Boediono Turunkan Popularits SBY, detikNews Online 23:18 WIB, <http://www.detiknews.com/read/2011/10/16/231834/1745253/10/lsi-gaya-kepemimpinan-boediono-turunkan-popularitas-sby>, (diunduh 18 Oktober 2011, 15:55 WIB).

dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 33 provinsi pada 25 April-4 Mei 2011. Responden dipilih secara ‘random sampling’ dengan ‘margin of error’ sekitar 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.⁹

Lembaga survei lainnya Jaringan Suara Indonesia (JSI), merilis data bahwa angka kepuasan terhadap pemerintah SBY-Boediono pada Januari 2010 sebesar 70 persen, Oktober 2010 sebesar 62 persen, dan oktober 2011 tinggal 52,2 persen. Survei JSI yang bertema ‘Evaluasi Dua Tahun pemerintahan SBY dan Preferensi Pilihan Parpol dan Presiden’ tersebut dilakukan pada 1.200 responden pada 10-15 Oktober 2011. Metode survei yang digunakan adalah *multistage random sampling* dengan wawancara tatap muka langsung, menggunakan kuesioner dengan *margin error* sebanyak 2,9 persen.¹⁰

Penurunan tersebut disebabkan karena persoalan dalam bidang ekonomi dan hukum yang masih belum terselesaikan. Selain itu, JSI mencatat bahwa dari 15 janji kampanye SBY-Boediono, setidaknya delapan diantaranya memperoleh angka merah karena tidak terealisasi. Kedelapan janji tersebut adalah soal pemeliharaan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan daerah, pembangunan perumahan rakyat dan rusun, reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan jumlah penduduk miskin serta pengentasan pengangguran.¹¹

Lembaga survei berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada. Pemberitaan detikNews dalam penelitian ini, menggunakan referensi data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagai salah satu lembaga survei ternama di Indonesia. Lembaga yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) ini bersifat independen, non-partisan dan nirlaba. LSI bekerja atas dasar prinsip

⁹ Yogi Ardhi, Menurunnya Popularitas SBY Harus Jadi Momentum, Republika online edisi 18 Mei 2011, 12:47 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/05/18/ldmrj-menurunnya-popularitas-sby-harus-jadi-momentum> (diunduh 9 Januari 2012, 12:48 WIB).

¹⁰ Anggi Kusumadewi & Syahrul Ansyari, Kepuasan pada SBY Turun, Demokrat Tak Cemas, Vivanews.com edisi 24 Oktober 2011, 07:01 WIB <http://us.politik.vivanews.com/news/read/258076-kepuasan-pada-sby-turun--demokrat-tak-cemas> (diunduh 9 Januari 2012, 15:52 WIB).

¹¹ Anggi Kusumadewi & Syahrul Ansyari, Survei : Kepuasan Publik pada SBY Menurun, Vivanews.com edisi 23 Oktober 2011, 15:16 WIB, <http://us.politik.vivanews.com/news/read/258043-survei--publik-makin-tak-puas-pemerintah-sby> (diunduh 9 Januari 2012, 16:04 WIB)

akademik dan analisis statistik yang relevan, serta bersandar pada kode etik survei opini publik (*International Association of Public Opinion Research*). SBY sebagai salah satu pihak yang disurvei, menyatakan bahwa lembaga ini kredibel (Jawa Pos, 28 Juli 2004).¹²

Dalam hal ini, penulis hanya mengkaji pemingkakan berita pada detikNews, yang frekuensi pemberitaan tentang reshufflenya sangat banyak dengan gaya pemberitaan yang cukup kritis dan lengkap dalam mengkaji peristiwa. Dalam pemberitaannya, detikNews dengan tegas memuat penyebab dan aspek yang menyebabkan merosotnya kepemimpinan SBY secara lengkap, seperti aspek kepemimpinan SBY yang menonjolkan pencitraan politik, kinerja wakil presiden dan menteri yang lambat, dan keengganan SBY dalam menggantikan kabinetnya yang berasal dari partai koalisi.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena terkait aktor politik yang diwacanakan di dalamnya, yakni presiden SBY sebagai tokoh politik dan pemimpin bangsa. Dalam hal ini, detikNews menggambarkan presiden SBY sebagai sosok yang masih menggemborkan kharisma dan pencitraan dalam kehidupan politiknya.

Dalam pemberitaan detikNews, pelaksanaan reshuffle disebut-sebut bukan hanya sebagai usaha untuk perbaikan kinerja pemerintahan, tetapi ada muatan politis lain yang hendak dituju. detikNews memuat berbagai pernyataan politikus lainnya, tentang pelaksanaan reshuffle ini. Wakil ketua umum partai Gerindra menyatakan bahwa SBY malah menugaskan menteri-menteri yang bukan merupakan ahli dibidangnya.¹³ Sekjen DPP PKS Anis Matta melihat gelagat reshuffle lebih berorientasi kepada pengaturan logistik 2014, ketimbang perbaikan kinerja kabinet. Sementara Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PuKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa kabinet bentukan SBY kali ini, menjadi kabinet tergemuk dengan banyaknya wakil menteri. Gaya SBY dipandang terlalu memikirkan pertimbangan politik yang justru memperlihatkan ketidakseriusan bekerja untuk rakyat, tetapi merangkul banyak pihak agar tidak tergoyahkan.

¹² Tentang LSI, <http://www.lsi.or.id/profil/1/profil-lsi>, (diunduh 9 Januari 2012, 13:38 WIB).

¹³ Gerindra Nilai Menteri Pilihan SBY Tak Jelas Prestasinya, 21 Oktober 2011, <http://www.detiknews.com/read/2011/10/21/031136/1749141/10/gerindra-nilai-menteri-pilihan-sby-tak-jelas-prestasinya> (diunduh, 21 Oktober 2011, 13:33 WIB).

Disisi lain terdapat wacana yang menyatakan bahwa kegaduhan reshuffle juga ditujukan untuk meredam kasus besar yang belakangan mengarah ke SBY, misalnya kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan bendahara Umum Partai Demokrat dan kasus century yang mulai dikorek-korek lagi pasca audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut tampak dari lamanya waktu peluncuran isu reshuffle, dan proses yang dilakukan menyedot perhatian publik.

1.2 Permasalahan

Media massa, salah satunya media online memiliki peran dua sisi mata uang, sebagai fungsi dan disfungsi. Pers sebagai media informasi, merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi sekaligus merubah perilaku masyarakatnya.¹⁴ Pemberitaan yang diberikan media kepada khalayak, akan menumbuhkan opini di benak khalayak tentang suatu isu/pemberitaan. Ketika detikNews memberitakan peristiwa reshuffle secara kritis, maka khalayak juga akan berpikir kritis menanggapi, yang dapat dilihat dari respon yang diberikan. Penulisan berita tersebut tergantung pada pembingkaiannya yang berlaku di suatu media.

Pembingkaiannya pada media massa akan menentukan priming yang berkembang di masyarakat. Ketika media memberitakan suatu peristiwa tanpa memperhatikan aspek jurnalisme yang berlaku, hal tersebut juga menimbulkan agenda publik yang salah, karena masyarakat mengikuti media. Pemberitaan tersebut berdampak pada respon pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat tentang pembingkaiannya, juga tentang isu/peristiwa yang diberitakan.

Pemberitaan tentang reshuffle kabinet mendapat perhatian penuh dari berbagai media di tanah air. Hal ini disebabkan karena penting dan tingginya nilai berita tentang reshuffle yang menyangkut kinerja pemerintahan kedepannya. Namun, pemberitaan tentang satu media dan media lainnya, khususnya media online saling berbeda, satu dengan yang lainnya. Penulis memilih detik.com sebagai objek penelitian, karena pembingkaiannya yang cukup kritis dan

¹⁴ Asep Saeful Muhtadi, 1999, *Jurnalistik (Pendekatan Teori dan Praktik)*, Cetakan kedua, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm.44.

lengkap dalam memberitakan reshuffle kabinet. Selain itu, frekuensi berita yang diberikan, terbilang cukup banyak dan lengkap.

Dibanding dengan media online lainnya, detik.com merupakan media online yang pertama dan menjadi pelopor bagi kemunculan jurnalisme online lainnya. detik.com menjadi media jurnalisme online yang banyak dikunjungi dan mudah diakses oleh setiap pengunjung. detik.com memuat beragam informasi yang kemudian dibagi menjadi semacam rubrik, yang membahas berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari isu/peristiwa, kesehatan, hingga hiburan.

Berita tentang reshuffle kabinet yang banyak diberitakan di media online khususnya detikNews, merupakan isu penting yang harus dikaji. Media dan banyak pihak menyebut bahwa pelaksanaan reshuffle kabinet yang dilakukan presiden tidak sebatas untuk kemajuan kinerja pemerintahan. Pemberitaan ini terkait dengan citra kepemimpinan SBY sebagai pemimpin negara, yang mendapat berbagai penilaian dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaan reshuffle, SBY digambarkan sebagai pemimpin yang ingin mendapatkan dukungan rakyat, namun tidak berani melawan parpol dalam koalisi. SBY tidak mencopot menteri yang kinerjanya tidak maksimal, tetapi menempatkan wakil menteri.

Dengan pelaksanaan dan hasil reshuffle yang demikian, muncul berbagai pro dan kontra dari publik terkait dengan hasil reshuffle itu sendiri. Kegiatan reshuffle yang ingin memperbaiki kinerja pemerintahan dan citra kepemimpinan yang buruk, malah semakin menurunkan popularitas presiden SBY. Pengangkatan wakil menteri, justru menyebabkan terjadinya penggemukan kabinet dan membengkaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini dinilai sebagai usaha presiden SBY untuk tetap pada posisi aman, dengan menempatkan wakil menteri pada pos kementerian yang dirasa tidak berjalan. Sehingga kinerja pemerintahan tetap berjalan, tanpa harus memberhentikan menteri yang bermasalah, terutama mereka yang berasal dari partai koalisi.

Dengan keputusan reshuffle yang demikian, popularitas Presiden SBY akan semakin menurun. Penurunan popularitas tersebut juga dipicu dengan banyaknya sejumlah kasus nasional yang tidak terselesaikan; kepemimpinan SBY yang dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi kasus yang menyangkut dirinya, namun sangat lamban bereaksi terhadap kasus yang menyangkut rakyat; SBY

tidak memiliki operator politik yang kuat dinilai dari lambannya kinerja wakil presiden; dan ketidakberdayaan SBY mengatur rumahnya sendiri, dengan banyaknya kader Demokrat yang terjat kasus korupsi.

Dari berbagai pembahasan diatas, peneliti ingin melihat sejauh mana detikNews melakukan pembingkaihan pemberitaan tentang reshuffle kabinet, yang secara implisit mengandung muatan-muatan yang justru menurunkan popularitas Presiden SBY sebagai pemimpin negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembingkaihan pemberitaan tentang reshuffle kabinet yang secara implisit justru menurunkan popularitas Presiden SBY sebagai pemimpin negara dilihat dari kepemimpinan SBY dalam pelaksanaan reshuffle kabinet Bersatu jilid II tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai bidang, diantaranya:

1. Manfaat akademis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagaimana media melakukan pembingkaihan tentang Presiden SBY dikaitkan dengan kualitas kepemimpinannya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi media untuk lebih bersifat kritis terhadap sosok kepemimpinan presiden, bukan saja dari sisi kualitas kepemimpinannya, tetapi juga dari sisi budaya berpolitik SBY.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Ideologi Media

Raymond Williams mendefinisikan ideologi sebagai sistem diartikulasikannya makna, nilai-nilai, keyakinan, dari jenis yang biasa yang diabstraksikan sebagai sudut pandang. Menurut Samuel Becker (1984), ideologi mengatur cara kita untuk memandang dunia dan diri kita sendiri, dan mengontrol apa yang kita lihat secara alami. Gouldner mengatakan bahwa ideologi mengasumsikan adanya kepentingan khusus sebagai mekanisme simbolis kepentingan para strata sosial yang beragam, yang kemungkinan membuat tanggapan yang kompatibel terhadap perubahan kondisi sosial.¹⁵

Secara umum, ideologi mempunyai pengertian dalam tataran positif dan negatif. Dalam tataran positif, ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia yang menyatakan sistem nilai kelompok atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasi kepentingannya. Sedangkan dalam tataran negatif, ideologi dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu.¹⁶

Menurut Teun A. Van Dijk, ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. *Pertama*, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual, dimana ideologi membutuhkan *share* diantara anggota kelompok atau organisasi. *Kedua*, ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok.

Pendekatan konstruksionisme memperkenalkan konsep ideologi untuk menjelaskan bagaimana wartawan membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih menonjol dibandingkan

¹⁵ Pamela J. Shoemaker & Stephen D. Rees, 1996, *Mediating The Message; Theories of Influences on Mass Media Content*, Second Edition, (USA: Longman Publishers), hlm.222.

¹⁶ Mannheim, 1991, *Ideology dan Utopia. An Introduction to The Sociology of Knowlwdge*. (London:outledge), hlm 59-116.

pandangan kelompok lain dan sebagainya. Kecenderungan atau ideologi itulah yang menentukan bagaimana fakta itu dipahami, fakta mana yang diambil dan mana yang dibuang.

Media dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana satu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media disini tidak dipandang sebagai wilayah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok ditampung. Dalam hal ini, media memerankan dua hal, yakni sebagai sumber dari kekuasaan hegemonik di mana kesadaran khalayak dikuasai, serta media dapat menjadi sumber legitimasi, di mana lewat media mereka yang berkuasa dapat memupuk kekuasaannya agar tampak absah, benar, dan memang seharusnya seperti itu.

2.2 Media online

Media online adalah salah satu media informasi yang menggunakan jaringan internet, dimana media tersebut mampu memberikan beragam pilihan. Internet di *design* sebagai media komunikasi dua arah dimana masyarakat mampu memproduksi, dan membuat berita harian menjadi teks interaktif.¹⁷ Media online adalah salah satu bagian dari *new* media yang memiliki karakteristik berbeda dengan media tradisional. Beberapa yang menjadi keuntungan media online adalah:¹⁸

1. *Audience Kontrol*. Publik menjadi lebih leluasa dalam memilih berita yang diinginkannya. Publik (*audience*) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam produksi berita.
2. *Nonlienarity*, yang memungkinkan jurnalis lebih fleksibel dalam menyajikan berita, juga memudahkan publik untuk memilih informasi yang diinginkannya.
3. *Storage and retrieval*, dimana berita-berita di media online, akan selalu tersimpan sehingga mudah untuk diakses kembali oleh publik.
4. *Unlimited space*, memungkinkan untuk memuat jumlah berita yang disampaikan menjadi panjang sehingga menjadi lebih lengkap.

¹⁷ Jim Hall, 2001, *Online Journalism: A Critical Primer*, (London: Pluto Press), hlm. 14.

¹⁸ Jim Hall, 2005, *Online Journalism: Principles and Practices of News for The Web*, (London: Halcomb Hathaway Publisher), hlm.210.

5. *Immadiacy*, dimana berita disampaikan secara cepat melebihi kecepatan media tradisional dan langsung kepada publik.
6. *Multimedia capability*, yang mendukung kinerja redaksi dalam menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lain dalam berita secara bersamaan.
7. *Interactivity* (timbal-balik), yang memungkinkan adanya peningkatan partisipasi publik dalam pemberitaan secara langsung.

2.3 Jurnalisme Online

Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita. Deuze¹⁹ menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme online dengan media tradisional, terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “*Online Journalism* harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlinks*”.

Pavlik dalam *Journalism and New Media* (2001)²⁰, menyebut tipe baru jurnalisme *online* sebagai *contextualized journalism*, karena mengintegrasikan 3 fitur komunikasi yang unik, yaitu kemampuan multimedia berdasarkan platform digital, kualitas interaktif komunikasi online, dan fitur yang ditatanya (*customizable features*).

Rafaeli dan Newhagen²¹ mengidentifikasi 5 perbedaan utama antara jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atas pembaca, tidak seorang pun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung, dan interaktifitas web. Karakteristik lain dari media ini adalah kecepatannya secara keseluruhan yang menarik

¹⁹ Septiawan Santana K, 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm.137.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

sekaligus menakutkan. Jurnalisme online memungkinkan jurnalisnya untuk menyuguhkan berita terbaru sehingga pembaca akan selalu mengetahui hal-hal baru lainnya.²²

Kekuatan jurnalisme online terletak pada kemampuannya dalam mengupdate informasi terbaru termasuk foto, video dan audio yang mendukung, menampilkan berita secara langsung, mampu lebih mendalam dibanding media penyiaran. Sedangkan yang menjadi kelemahannya yaitu harus menyalakan komputer, kualitas videonya yang rendah, membutuhkan konsentrasi, *download* yang mengganggu akses cepat ke informasi, dan kadang-kadang sumber masih dipertanyakan.

Penyajian atau perancangan informasi dalam bentuk web ini tidak bersifat linear, dua dimensi, dengan paradigma urutan dari halaman depan dengan berita-berita penting sampai ke halaman belakang. Dalam jurnalisme online, ada konsep navigasi dan interface, dalam menuntun khalayak. Dari urutan daftar isi (indeks) di tampilan awal dari layar situs, khalayak bisa diajak meloncat-loncat ke berbagai artikel di halaman berikutnya berdasarkan hubungan *link* yang telah dirancang.

2.4 Framing

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Di sini media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.²³ Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh. Karena penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut akan membuang (hanya) bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak.

²² Richard Craig, 2005, *Online Journalism: Reporting, Writing and Editing for New Media*, (USA: Wardsworth), hlm.30.

²³ Eriyanto, 2009, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Cetakan Keenam, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta), hlm.66-67.

Analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan si tertindas, tindakan politik mana yang konstitusional dan yang inkonstitusional, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung dan sebagainya.

Frame media adalah bentuk yang muncul dari pikiran (kognisi), penafsiran, dan penyajian dari seleksi, penekanan, dan pengucilan dengan menggunakan simbol-simbol yang dilakukan secara teratur dalam wacana yang terorganisir, baik dalam bentuk verbal maupun visual. Dengan frame, jurnalis memperoleh berbagai informasi yang tersedia dengan jalan mengemasnya sedemikian rupa dalam kategori kognitif tertentu dan disampaikan kepada khalayak.

Ada dua aspek dalam framing, yaitu memilih fakta/realitas dan menuliskan fakta. Proses memilih fakta didasarkan pada asumsi, karena wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini, selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tersebut dilakukan dengan memilih aspek tertentu, fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lainnya.

Proses penulisan fakta berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Elemen menulis fakta berkaitan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.

Meskipun sulit membuat berita yang objektif terhadap semua pihak dan fakta-fakta yang ada, objektivitas tetap diperlukan sebagai tolak ukur dalam menilai berita. Menurut Entman, secara teoritik objektivitas membatasi wartawan untuk tidak melukiskan realitas menurut kepentingannya sendiri. Persyaratan utama untuk mencapai objektivitas berita, yaitu aspek depersonalisasi yang menuntut reporter untuk tidak melibatkan ideologi mereka sendiri ke dalam pemahaman tentang berita atau penilaian yang berkaitan dengan substansi berita dan aspek keseimbangan untuk mencapai posisi netral. Menurut John C. Merrill dan Everett E. Dennis,²⁴ objektivitas dapat dicapai dengan memisahkan fakta dari pendapat, menyajikan pandangan terhadap berita tanpa disertai dimensi emosional dan berusaha untuk jujur dan seimbang dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjawab agar mendapatkan informasi yang cukup.

Asumsi dasar dari framing adalah individu wartawan selalu menyertakan pengalaman hidup, pengalaman sosial dan kecenderungan psikologisnya ketika menafsirkan pesan yang datang kepadanya.²⁵ Dalam proses konstruksi sosial terhadap suatu wacana, pengalaman dan kecenderungan individu mengendap, mengkristal dan membentuk pemahaman yang memberikan kemampuan individu untuk memetakan, menerima, mengidentifikasi dan memberikan label pada peristiwa dan informasi yang dihadapinya. Dengan kata lain, proses framing merupakan bagian yang integral dari proses redaksional media massa dan menempatkan awak media pada posisi strategis.

2.5 Priming

Priming mengacu pada aktivitas terkait dengan emosi pikiran dan konsep-konsep lain yang ada dalam memori.²⁶ Priming merupakan efek agenda setting media. Ketika sebuah isu atau peristiwa mendapat perhatian media massa yang terus menerus, maka khalayak yang mengkonsumsi pemberitaan isu atau peristiwa tersebut akan berpikir sesuai dengan agenda yang dibuat media. Perubahan

²⁴ Agus Sudiby, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKis), hlm.73.

²⁵ Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, (Yogyakarta: LKis), hlm.23.

²⁶ Kirsh, Steven J, 2006, *Children, Adolescents, and Media Violence; A Critical Look at the Research*, (California: Sage Publication), hlm. 135.

pemikiran, sikap dan pendapat dari khalayak sesudah mengkonsumsi agenda dari media itulah yang dinamakan priming.²⁷

Priming digunakan secara luas untuk mempelajari efek jangka pendek dari kekerasan dalam media, efek jangka panjang dari liputan politik evaluasi calon kandidat dan penggambaran stereotipe minoritas. Priming bukanlah suatu teori atau penjelasan, tetapi merupakan prosedur yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi direpresentasikan dalam memori. Beberapa karakteristik priming, diantaranya:²⁸

1. Efeknya akan hilang seiring dengan waktu. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa tingkat aktivasi dari sebuah prime akan hilang dari waktu ke waktu jika tidak ada aktivasi tambahan.
2. Priming yang kuat cenderung menimbulkan dampak yang kuat pada penilaian dan perilaku publik. Priming yang kuat akan menghasilkan tingkat aktivasi yang tinggi dan akan mengambil lebih banyak waktu dibandingkan dengan priming lemah.
3. Efek priming menjadi lebih kuat pada situasi yang ambigu.

2.6 Komunikasi Politik

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.²⁹ Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya.³⁰

²⁷ Dhavan V. Shah, Douglas M. McLeod, Melissa R. Gotlieb, dan Nam-Jin Lee, 2002, *Framing and Agenda Setting*, dalam Chapter 6 *The Sage handbook of Media Processes and Effects*, (California: Sage Publication), hlm. 86.

²⁸ David R. Roskos-Ewoldsen, Beverly Roskos-Ewoldsen, 2002, *Current Research In Media Priming* dalam Chapter 6 *The Sage handbook of Media Processes and Effects*, (California: Sage Publication), hlm. 179.

²⁹ Dan Nimmo, 2005, *Komunikasi politik. Komunikator, Pesan, dan Media*, Cetakan ke-6. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.6.

³⁰ Dan Nimmo, *opcit*, hlm.8.

Nimmo³¹ menyebutkan bahwa politik terjadi dalam setting politik yang ditandai dengan perselisihan dan konflik. Makna perselisihan itu diturunkan melalui komunikasi, dan upaya penyelesaiannya atau terjadinya konsensus, juga dipertukarkan melalui komunikasi, sehingga banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Perpaduan komunikasi dan politik telah berkembang menjadi kajian ilmiah yang bersifat lintas disiplin, dengan nama komunikasi politik (*political communication*). Menurut Nimmo, komunikasi politik adalah kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Melalui formula Lasswell (*who, says what, to whom, with what channel and, with what effect*), Nimmo melakukan analisis tentang komunikasi politik, yaitu komunikator politik (siapa), pesan politik (berkata apa), media komunikasi politik (melalui saluran apa), khalayak politik (kepada siapa), dan efek politik (bagaimana efeknya). Analisis kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Who* (Siapa?)

Komunikator, yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan (*message*).³² Dalam penelitian ini, yang menjadi *who* adalah situs detikNews yang memberikan informasi kepada khalayak.

2. *Says what* (Mengatakan apa?)

Sebagain besar politik adalah pembicaraan. Untuk memahami “mengatakan apa” dari komunikasi politik, maka melihat bahasa yang digunakan orang dalam berbicara, yaitu gejala linguistik politik. Komunikator politik menggunakan simbol dan bahasa, baik untuk memberikan informasi maupun untuk meyakinkan khalayak. Yang menjadi aspek *what* dalam pbingkai media adalah tentang kasus-kasus yang mengiringi reshuffle kabinet.

3. *With what channel* (Melalui saluran apa?)

Komunikator menyampaikan bentuk-bentuk simbolik dan kombinasi tersebut dengan berbagai teknik dan media, diantaranya secara lisan melalui perbincangan personal, melalui cetakan seperti koran dan majalah, dan dengan

³¹ Anwar Arifin, 2011, Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, edisi ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.3.

³² Onong Uchjana Effendi, 1992, Kepemimpinan dan Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju), hlm.57.

teknik elektronik seperti radio dan televisi. Saluran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media online, yang dipilih karena mampu menerima respon pembaca secara cepat.

4. *To whom* (Kepada siapa?)

Penerima adalah partisipan yang aktif dalam komunikasi dengan sumber yang mengindera, menginterpretasikan, membayangkan, menetapkan atau berbuat sendiri dengan cara yang memiliki nilai berita. Setiap orang sesungguhnya adalah suatu jenis komunikator politik, hanyalah masalah perspektif untuk menentukan pihak mana yang disebut “komunikator” dan mana “komunikan”. Pihak yang menjadi komunikan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pembaca situs detikNews.

5. *With what effect* (Bagaimana efeknya?)

“Akibat” dari “siapa mengatakan apa dengan saluran apa dengan siapa” tidak ditentukan independen dari proses menetapkan “dengan siapa” dalam rumus Lasswell. Akibat tidak ditentukan terpisah dari interpretasi, malahan akibat adalah tindakan *interpretative* sinambung yang diturunkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan politik. Efek yang timbul dari pemberitaan detikNews sangat beragam, ada yang kontra dan pro atas keputusan reshuffle yang dilakukan presiden.

2.7 Peran Media Massa

Media massa memiliki banyak aspek yang membuatnya penting dalam kehidupan politik. Salah satu keunggulan media massa itu adalah daya jangkauannya (*coverage*) yang sangat luas dalam menyebarluaskan berita dan opini publik dengan dukungan teknologi yang canggih. Media massa juga mampu melipat gandakan pesan politik (*multiplier of message*) dengan jumlah yang besar, dan sekaligus menciptakan wacana politik pada khalaknya, dalam menjalankan fungsinya sebagai agenda setter.³³

³³ Anwar Arifin, 2010, Opini Publik, (Depok: Gramata Publishing), hlm. 154.

Dalam sistem demokrasi, media massa bisa berperan sebagai *watch dog*, bisa sebagai *guard dog* dan bisa menjadi semacam *lap dog*.³⁴ Sebagai *watch dog* (anjing pengawas), media massa menjadi musuh berat buat pemerintah dan korporasi-korporasi besar dan sekaligus berpihak pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tuna kuasa dan yang tidak terorganisasi secara baik. Dalam model pertama ini, para jurnalis memandang dirinya sebagai pembela kebenaran dan keadilan. Media ini tidak sudi menyuarakan kepentingan para politisi dan para eksekutif puncak.

Model kedua adalah sebagai *guard dog* (anjing penjaga), dimana para jurnalis mendukung lembaga-lembaga politik yang dominan, kelompok-kelompok ekonomi penting dan nilai-nilai yang diterima masyarakat luas. Akan tetapi media massa dapat melancarkan kritik terhadap lembaga-lembaga itu, terutama ketika sebagian elit dari kelompok-kelompok itu melanggar sistem nilai yang berlaku. Hanya saja, para jurnalis tetap mendukung struktur kekuasaan yang ada, walaupun melontarkan kritik terhadap kaum elitnya.

Dalam model ini komitmen para jurnalis dan media informasi adalah untuk melestarikan struktur politik dan ekonomi yang sudah ada maka hakekatnya mereka mendukung *statusquo* dan keamanan. Dengan demikian kritik dan kecaman yang dilontarkan hanya menyangkut perorangan dan kadangkala mengenai kelemahan-kelemahan beberapa institusi, tetapi keterikatan mereka untuk menjaga kelangsungan struktur politik dan ekonomi yang ada adalah cukup berat.

Model ketiga adalah sebagai *lap dog* (anjing pangkuan). *Lap dog* adalah anjing kecil nan jinak yang suka dielus-elus oleh pemiliknya di pangkuannya dan tidak berbahaya sama sekali asalkan tetap diberi makan dan minum. Dalam model ketiga ini, media massa memproduksi berita-berita untuk melayani kepentingan elit politik dan elit ekonomi dan membiarkan kaum miskin dan yang sengsara berada tetap di pinggiran.

³⁴ Mohammad Amien Rais, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*, (Yogyakarta: PPSK Press), hlm. 125-126.

2.8 Kepemimpinan

Peran dasar seorang pemimpin adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan individu sehingga mereka berkontribusi pada tujuan dan adaptasi dari kelompok. Kepemimpinan dilakukan melalui komunikasi, tetapi para pemimpin bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dilihat dari perspektif *power relationship*, Northouse³⁵ mendefinisikan kepemimpinan sebagai relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Kegeniusan seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam melihat dan melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama.³⁶

Kepemimpinan dapat menciptakan keikutsertaan dalam bertindak dan berperilaku untuk suatu tujuan, nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan ekspektasi bersama oleh pemimpin dan pengikutnya. Hubungan antara *leader-follower* ini merupakan interaksi motivasi per orang, yang terdiri dari dua bentuk dasar, yaitu *transactional leadership* dan *transforming leadership*.

Dalam *transactional leadership*, seseorang berkeinginan memimpin orang lain untuk mencapai proses pertukaran hal berharga, bisa bersifat ekonomis, politis atau psikologis. Interaksi tersebut mengarah kepada proses transaksi yang hanya menguntungkan secara individu. Dan ketika interaksi tersebut tidak lagi menguntungkan, maka individu tidak bersedia memimpin atau dipimpin. Sedangkan dalam *transforming leadership*, seseorang berhubungan dengan orang lain dilatarbelakangi motivasi bersama, dan untuk keuntungan bersama. Dalam kepemimpinan ini tercipta efek saling membentuk dan mempererat hubungan diantara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin akan merasakan apa yang dirasakan anggotanya, dan sebaliknya anggota juga akan merasakan apa yang dirasakan pemimpinnya.

McCall dan Lombardo (1983), menyatakan ada empat ciri utama pemimpin yang bisa berhasil, yaitu:³⁷

1. Emosional yang stabil dan kesabaran. Tetap tenang, percaya diri terutama ketika dalam masalah.

³⁵ M. Alfian Alfian, 2009, Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), hlm. 65.

³⁶ James Burns, 1978, Leadership, (New York: Harper & Row Publisher), hlm.19.

³⁷ ChangingMind.org. Leadership Theories, http://www.changingminds.org/disciplines/leadership/theories/leadership_theories.htm (diunduh 1 Desember 2011, 12:48 WIB).

2. Mengakui kesalahan daripada menghabiskan energi untuk menutupinya.
3. Keterampilan interpersonal yang baik, dimana mampu berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain tanpa harus menggunakan taktik negatif atau pemaksaan.
4. Luas intelektual, yang mampu memahami dan menguasai berbagai bidang.

2.8.1 Pendekatan Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses interaksi untuk mengelola suatu organisasi. Terdapat beragam sudut pandang tentang pendekatan kepemimpinan, yaitu:³⁸

1. Pendekatan *Good-Leaders-Are-Born*. Pandangan tradisional yang melihat kepemimpinan sebagai sifat bawaan, menjadi kelebihan yang menjadi turunan. Dalam perspektif ini, pemimpin yang baik itu diwariskan dalam kepribadian seseorang bukan diciptakan. Dalam pandangan ini, kepemimpinan adalah mencari orang yang terlahir sebagai pemimpin dan yang tidak.
2. Pendekatan *One Best Style*. Pendekatan ini melihat kepemimpinan sebagai gaya dalam membuat keputusan. Ada tiga karakteristik kepemimpinan di dalamnya, antara lain:
 - a. *Autocratic*, dimana pengambilan keputusan terpusat pada pemimpin. Pemimpin dalam hal ini akan mengontrol secara ketat segala informasi, menugaskan orang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya serta memiliki sistem formal untuk akuntabilitas.
 - b. *Democratic* atau *Participatory*, dimana otoritas pengambilan keputusan dibagi. Para anggota grup mendapat kesempatan untuk membuat keputusan dan bisa saling berbagi informasi. Selain itu, peran dan tanggung jawab tergantung pada keputusan bersama.
 - c. *Laissez faire*, disebut juga gaya “hands off” dimana tidak ada otoritas yang dilaksanakan oleh pemimpin.

³⁸ Brent Ruben D. and Lea P. Stewart, 2006, *Communication and Human Behavior* 5th Edition, (USA: Pearson Education), hlm. 284-285.

3. Pendekatan *Contextual*. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan dilihat sebagai hasil kemampuan individu (baik yang diturunkan ataupun dipelajari), tujuan dibentuknya suatu grup, tekanan yang datang dari luar grup, cara anggota berbicara, bekerja dan berhubungan satu dan yang lainnya.

2.8.2 Tipe Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan, terdapat beberapa tipe yang biasa diterapkan, diantaranya adalah:³⁹

1. Tipe kharimatis. Tipe ini memiliki kekuatan energi, daya-tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Pemimpin ini memiliki banyak inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri.
2. Tipe paternalistis, yang memiliki kepemimpinan yang kebabakan dengan menganggap bawahannya belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Pemimpin ini akan bersikap *overly protective*, dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya dalam mengambil keputusan sendiri. Ia tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas, karena selalu bersikap maha tahu.
3. Tipe militeristis, yang sok kemiliter-militeran dengan gaya luarnya. Pemimpinnya lebih banyak menggunakan sistem perintah kepada bawahannya, menyenangi formalitas, menuntut adanya disiplin keras, komunikasi hanya searah dan tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan dari bawahannya.
4. Tipe otokratis (*authoritative/dominator*). Kepimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada *a one-man show*. Setiap perintah dan kebijakan akan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya, ia

³⁹ Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, Edisi 2 Cetakan kedelapan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.69-74.

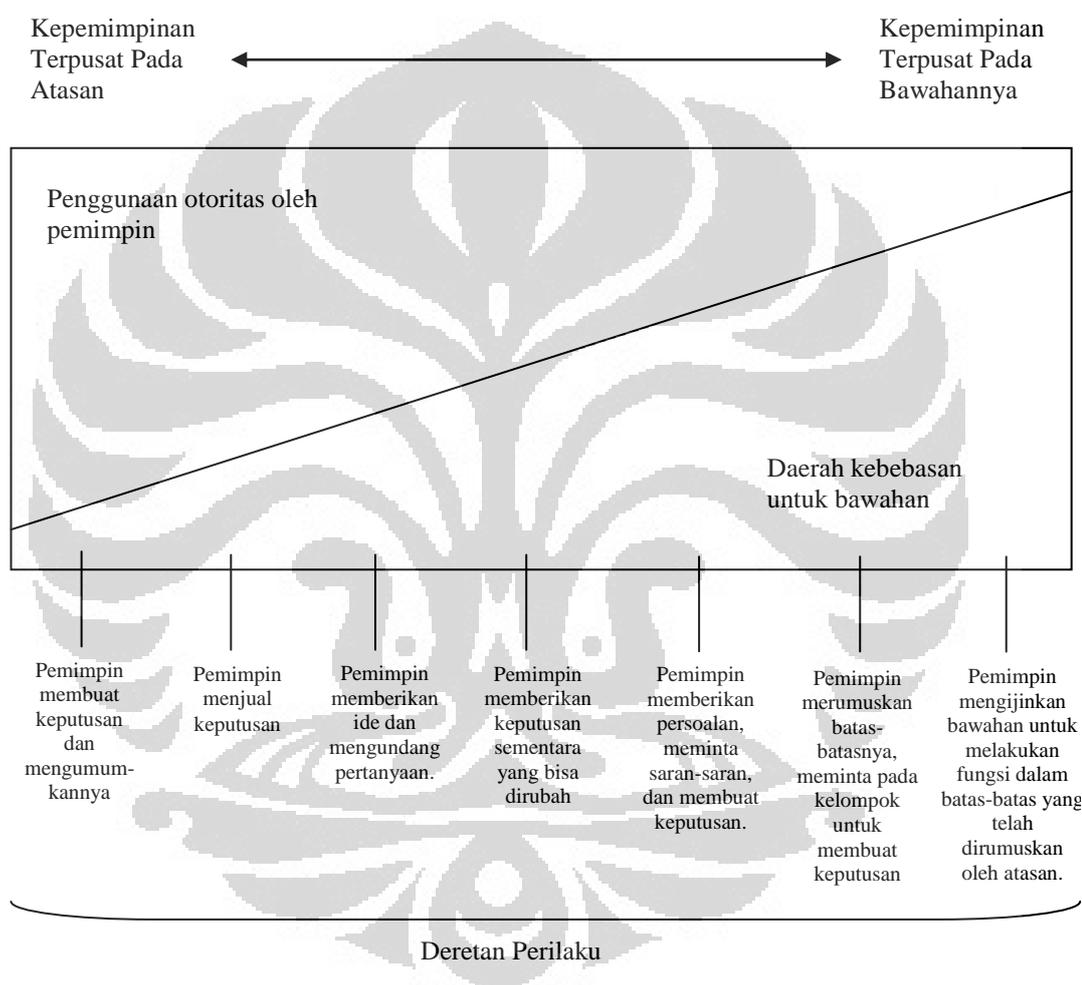
senantiasa berkuasa absolute dan merajai keadaan. Pemimpin mempertahankan prinsip *business*, efektivitas, efisiensi. Pemimpin mau bersikap baik terhadap bawahan, asal bawahan bersedia secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri.

5. Tipe *laissez faire*, dimana sang pemimpin praktis tidak memimpin. Ia membiarkan kelompoknya dan semua orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri.
6. Tipe populis, yaitu kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat dengan ideologi marhaenismenya, yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme dan sikap yang berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan/pengisapan serta penguasaan oleh kekuatan asing. Kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai masyarakat tradisional.
7. Tipe administratif atau eksekutif, yaitu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan.
8. Tipe demokratis, yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Dalam kepemimpinan ini, setiap anggota kelompok dan juga pemimpin lainnya terlibat aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja secara sukarela oleh kelompok.

2.8.3 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu, sehingga bawahan dapat menyelesaikan

tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien.⁴⁰ Dua kategori gaya kepemimpinan yang ekstrem selama bertahun-tahun adalah gaya kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan demokratis. Tannenbaum dan Schmidt berargumentasi bahwa gaya kepemimpinan otokrasi dan demokratis dapat didudukkan dalam suatu kontinum, dari perilaku kepemimpinan yang sangat otokratis pada suatu ujung, hingga ke perilaku yang sangat demokratis pada ujung lainnya.⁴¹



Gambar 1 Perilaku Kontinum Pemimpin

Sumber : How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business Review, 36, March-April

⁴⁰ Djoko Purwanto, 2006, Komunikasi Bisnis Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga), hlm. 24.

⁴¹ Robert Tannenbaum, Warren H. Schmidt, 1958, How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business Review, 36, March-April, hlm. 96.

Kepemimpinan kontinum merupakan gaya klasik. Dalam kepemimpinan ini, terdapat tujuh model gaya pembuatan keputusan oleh pemimpin, yakni:

1. Pemimpin membuat keputusan dan kemudian mengumumkannya kepada bawahan. Dalam model ini terlihat bahwa atasan memiliki otoritas yang banyak, dan daerah kebebasan bawahan sangat sempit.
2. Pemimpin menjual keputusan, dimana hak otoritas pemimpin masih tinggi. Model ini hampir sama dengan model pertama, dimana bawahan belum terlihat ikut serta dalam pengambilan keputusan.
3. Pemimpin memberikan pemikiran atau ide, dan mengundang pertanyaan. Dalam model ini terlihat pemimpin sudah membatasi otoritasnya, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pertanyaan. Bawahan sudah sedikit terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Pemimpin memberikan keputusan bersifat sementara yang kemungkinan dapat dirubah. Dalam model ini, bawahan sudah mulai banyak terlibat dalam pembuatan keputusan, dan otoritas pimpinan juga sudah berkurang.
5. Pemimpin memberikan persoalan, meminta saran-saran, dan membuat keputusan. Otoritas pemimpin dalam model ini sangat sedikit, sebaliknya bawahan
6. sudah memiliki kebebasan yang banyak dalam membuat keputusan. Pemimpin merumuskan batas-batasnya, dan meminta kelompok bawahan untuk membuat keputusan. Partisipasi bawahan dalam model ini, sudah cukup besar dari model sebelumnya.
7. Pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah dirumuskan oleh pimpinan. Dalam model ini, bawahan yang akan membuat keputusan.

2.9 Bahasa Politik

Setiap pernyataan politik selalu dilontarkan demi tujuan politis, yang erat dengan kepentingan tertentu, baik kepentingan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, agar tujuan tercapai, pernyataan politik harus dikemas sedemikian tupa

sehingga mampu merebut emosi dan simpati publik untuk dapat menyetujui, menerima, serta meyakini apa yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang benar sehingga nantinya sikap tertentu sebagaimana yang diinginkan dapat ditunjukkan. Ini menunjukkan bahwa, bahasa politik bukanlah model bahasa yang berciri *informatif*, melainkan bahasa yang bernuansa *ekspresif* sekaligus *persuasif*.⁴²

Dikatakan *ekspresif* karena dengan dan melalui bahasa politik, seorang politikus berupaya menggugah hati serta perasaan banyak orang untuk dapat menyetujui isi dari pesan politik yang disampaikan. Disebut *persuasif* karena melalui suatu argument politik, seseorang ingin meyakinkan massa pendengar akan kebenaran dari apa yang disampaikan. Ini mengisyaratkan bahwa bobot suatu pernyataan politik akhirnya bergantung kepada apa dan bagaimana respon publik terhadap pernyataan politik yang disampaikan. Dengan kata lain, semakin besar reaksi publik terhadap pernyataan politik tertentu, dan sepanjang reaksi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan semakin efektif juga lah pernyataan politik itu sendiri. Yang paling penting dalam sebuah pernyataan politik bukanlah pernyataan yang tertata dalam suatu alur penalaran yang logis, namun pernyataan politik tersebut memiliki kekuatan untuk membakar emosi pendengar agar menyetujui apa yang disampaikan.

2.10 Konteks Kultural Komunikasi

Komunikasi erat kaitannya dengan kebudayaan. Menurut Edward T. Hall (1976)⁴³, secara global kebudayaan dibagi dalam dua kategori, yaitu budaya konteks tinggi (*high context culture*) dan konteks rendah (*low context culture*). Pada budaya konteks tinggi, pesan nonverbal memainkan peranan lebih penting, dan kebanyakan makna sebuah pesan diinternalisasi oleh pendengar atau tergantung pada konteks. Budaya konteks rendah adalah budaya di mana makna

⁴² Y.P Hayon, 2005, Aspek Logis dalam Pernyataan-pernyataan Politik dalam Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah, Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol.7 No.2 Oktober 2005, hlm. 191-192.

⁴³ Tjipta Lesmana, 2009, Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. xx.

ditemukan dalam kode atau pesan yang eksplisit.⁴⁴ Komunikasi konteks tinggi sering ditandai dengan bahasa tubuh yang tidak jelas, atau bahasa verbal yang tidak *to the point*. Kebudayaan konteks tinggi menghasilkan komunikasi konteks tinggi dan sebaliknya.

Komunikasi dikatakan berkonteks tinggi ketika komunikator menggunakan “bahasa bersayap”, bahasa yang hanya bisa ditangkap artinya jika komunikan memahami budaya komunikator. Budaya ini menganggap penting ketidaklangsungan dalam pembicaraan karena pendengar diharapkan untuk tidak memerhatikan kode eksplisit dibandingkan makna yang dipahami melalui petunjuk nonverbal dan konteks. Sebaliknya, dalam komunikasi konteks rendah, komunikan tidak mengalami kesulitan memahami arti pesan yang disampaikan komunikator, sebab pesan yang disampaikan jelas, lugas dan langsung. Bangsa-bangsa timur, termasuk bangsa Indonesia umumnya menganut konteks tinggi, sementara bangsa-bangsa barat menganut kebudayaan konteks rendah.

Secara sederhana, kedua kategori budaya tersebut masih bisa dibagi lagi menjadi *high-high*, *medium-high*, dan *lower-high culture* serta *high-low*, *medium-low*, dan *low-low culture*. Keberagaman budaya di Indonesia menimbulkan konteks yang saling berbeda. Orang Medan dan Makassar umumnya lebih terus terang dan tegas. Konteksnya berbeda dengan orang Jawa yang lebih rendah (*lower high context*) konteks komunikasinya.

Perbedaan kontekstual tersebut, memberikan konsekuensi bagi komunikasi. Kultur-kultur konteks tinggi menyiratkan jauh lebih banyak kepercayaan dari kedua belah pihak. Apa yang bagi orang luar mungkin tampak sebagai percakapan yang sambil lalu dan tidak signifikan sebenarnya penting karena hal tersebut mencerminkan keinginan untuk membangun suatu hubungan dan menciptakan kepercayaan. Siapa diri komunikan (usia, senioritas, tingkatan dalam organisasi) sangat dihargai dan mempengaruhi tingkat kredibilitas. Namun, dalam konteks rendah, kontrak akan berlaku efektif bila dalam bentuk tertulis, dinyatakan melalui kata-kata yang cermat dan sangat legalistik.⁴⁵

⁴⁴ Richard West dan Lynn H. Turner, 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, 3rd ed, Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika), hlm. 188.

⁴⁵ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, 2007, *Organizational Behavior*, 12th ed, Penerjemah : Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 37.

2.11 Popularitas

Pemimpin memerlukan popularitas, tetapi popularitas bukanlah segalanya. Menurut Nixon⁴⁶, pemimpin tidak bekerja untuk mengejar popularitas, tetapi popularitaslah yang bakal mengejar dirinya. Popularitas tidak selalu identik dengan pemimpin, karena seseorang yang populer belum tentu mampu memimpin dan memberikan pengaruh pada orang lain. Ciri orang yang berpengaruh akan tampak dari orang yang mengikuti, meneladani, mendukung, dan kemudian berpartisipasi memenuhi gagasan pemimpin.⁴⁷ Salah satu rujukan fluktuasi popularitas pemimpin dilakukan melalui polling. Hasil polling dari waktu ke waktu dapat menunjukkan apakah popularitas pemimpin stabil, anjlok atau meroket.

Pemimpin selalu ingin tampil populer dan cenderung memperkuat pencitraan pribadi dan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin politik memiliki naluri untuk tetap bertahan dalam kekuasaan, dan apabila terpengaruh, akan berupaya tetap berpengaruh. Pada dasarnya, pemimpin yang baik mengetahui bahwa lebih penting dihormati daripada disenangi, dan bahwa performa lebih penting dari popularitas.⁴⁸

2.12 Reshuffle Kabinet

Istilah reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang bermakna mengocok kembali; menata ulang; menyusun kembali. Istilah reshuffle biasa muncul pada saat adanya desas-desus perombakan kabinet. Merombak kabinet adakalanya berarti dapat mengganti seluruh anggota kabinet dengan wajah baru, dapat memindahkan posisi anggota kabinet tanpa memasukkan wajah baru, atau dapat mengganti sebagiannya dengan wajah baru sementara anggota yang lain tetap berasal dari anggota lama.⁴⁹

⁴⁶ M Alfian Alfian, 2009, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 146.

⁴⁷ K.H. Toto Tasmara, 2006, *Spiritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spritual)*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 170.

⁴⁸ Oren Harari, 2003, *The leadership Secrets of Colin Powell, Sebuah Paradigma Baru Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), hlm. 31.

⁴⁹ Abdul Gaffar Ruskhan, 2007, *KOMPAS Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Grasindo), hlm.72.

Reshuffle kabinet mengandung beberapa arti, diantaranya:⁵⁰

1. Pemerintah tampak menyadari dan menyakui bahwa timnya sudah tidak bekerja sesuai dengan rencana, sehingga dibutuhkan tindakan agar ‘kendaraan’ yang ditumpangi rakyat tidak salah jalan.
2. Pemerintah peduli pada keresahan rakyat yang menunggu adanya perubahan, sehingga mencoba memperbaiki penampilannya.
3. Pemerintah membuktikan memiliki cita-cita sama dengan rakyat, untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Reshuffle sebenarnya adalah dialog yang intensif antara rakyat dan pemerintah, yang tidak lagi mempergunakan kata-kata tetapi tindakan. Saat yang menunjukkan dimana rakyat dan pemerintah masih terkait satu cita-cita untuk mengejar kepentingan bangsa dan negara. Reshuffle bukan hanya pergantian dan pergeseran tetapi sekaligus perubahan pencapaian.

2.13 Asumsi Teoritis

Cara media melakukan pembingkaihan atas isu atau peristiwa tertentu, menekankan adanya perbedaan yang menonjol pada aspek respon publik yang langsung terbaca, yang berbeda dengan media konvensional.

⁵⁰ Arie MP Tamba, Jurnal Nasional edisi Rabu, 28 Sep 2011, Reshuffle, <http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-09-28/183570> (diunduh pada 17 November 2011, pukul 11:58 WIB).

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Harmon (1970)⁵¹ adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang ada di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Dalam pemilihan dan pembuatan berita, pendekatan konstruktivisme mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Terdapat dua karakteristik penting dari pendekatan konstruktivisme, yaitu:⁵²

1. Menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.
2. Memandang komunikasi sebagai proses yang dinamis. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menyusun citra tertentu atau merangkai ucapan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas.

Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk melihat bagaimana media online, khususnya situs detikNews mengkonstruksikan penurunan popularitas presiden SBY pada pemberitaan tentang reshuffle kabinet Bersatu Jilid II.

⁵¹Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm.49.

⁵²Eriyanto, *opcit*, hlm.105.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami suatu fenomena tertentu dalam bentuk kata-kata atau bahasa dengan berbagai metode. Menurut Kirk dan Miller,⁵³ penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Jane Richie,⁵⁴ penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa teks berita di situs detikNews mengenai penurunan popularitas presiden SBY. Berita-berita yang dianalisis adalah berita tentang reshuffle kabinet sebagai salah satu upaya presiden untuk menaikkan kembali popularitasnya yang jauh menurun.

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Beberapa buku rujukan, misalnya Bogdan dan Biklen (1982), Guba dan Linciln (1994), Crewell (1994), Neuman (1991), Mostyn (1985) atau Moleong (1994), menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif, diantaranya:⁵⁵

1. Mengkonstruksi realitas makna sosial budaya
2. Meneliti interaksi peristiwa dan proses
3. Melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan sulit diukur
4. Memiliki keterkaitan erat dengan konteks
5. Melibatkan peneliti secara penuh
6. Memiliki latar belakang alamiah
7. Menggunakan sampel purposif
8. Menerapkan analisis induktif
9. Mengutamakan “makna” di balik realitas
10. Mengajukan pertanyaan “mengapa”, bukan “apa”.

⁵³ Lexy J. Moleong, *opcit*, hlm.4.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵⁵ Prasetya Irawan, 2007, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Cetakan Kedua, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia), hlm.6.

3.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial dan menyajikan gambaran yang lengkap tentang suatu kejadian dan hubungan yang terdapat dalam penelitian.⁵⁶ Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁵⁷

Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data bisa berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁵⁸ Penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana media online khususnya situs detikNews menyajikan pemberitaan kepada masyarakat tentang penurunan popularitas SBY pada pemberitaan reshuffle kabinet yang dilakukan pada kabinet Bersatu Jilid II.

3.4 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *social constructivisme*. Sosial konstruktivisme menekankan pada pertanyaan seperti bagaimana orang membangun sebuah konstruksi realitas? Apa yang mereka laporkan mengenai persepsi, kebenaran, penjelasan, kepercayaan dan sudut pandang? Apa konsekuensi dari konstruksi mereka terhadap tingkah laku untuk dirinya dengan orang lain dalam pergaulan yang saling mempengaruhi?⁵⁹ Pada dasarnya sosial konstruktivisme memaparkan apa yang memang secara sosial sudah dibentuk mengenai suatu fenomena sosial.

Strategi ini dipilih karena ingin melihat bagaimana realitas tentang pelaksanaan reshuffle kabinet dikonstruksikan oleh detikNews melalui sudut pandang dan gaya pemberitaannya dalam menyampaikan informasi kepada

⁵⁶ William Lawrence Neuman, 2003, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (USA: Pearson Education), hlm. 30.

⁵⁷ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaka Indonesia), hlm.54.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *opcit*, hlm.11.

⁵⁹ Michael Quinn Patton. 2002. *Qualitative Research & Evaluation methods*, 3rd edition, Thousand Oaks, (California: sage Publication), hlm.96.

khalayak. Cara pemberitaan detikNews dalam hal ini tentu saja dipengaruhi beragam faktor dalam media tersebut. Penelitian ini akan melihat bagaimana cara media memberitakan pelaksanaan reshuffle kabinet tersebut.

3.5 Unit Observasi

Berita reshuffle kabinet menjadi bahan analisis teks dalam penelitian ini, yang bersumber dari situs media online yaitu detik.com. Jurnalisme online ini dipilih karena pertimbangan berikut:

1. detik.com merupakan jurnalisme online pertama di Indonesia, yang menjadi pioner berdirinya jurnalisme online lain yang kemudian menjadi pesaingnya.
2. detik.com memberitakan reshuffle kabinet secara kritis dan lengkap dalam memberitakan peristiwa tersebut.

3.6 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita pada situs detikNews. Pemilihan teks berita tersebut dilakukan, karena sangat kuat membingkai tentang isu penurunan popularitas Presiden SBY dalam pemberitaan reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II.

Teks berita yang dipilih ditentukan mulai dari periode munculnya pemberitaan hasil Survei LSI tentang penurunan popularitas, hingga pelaksanaan reshuffle kabinet yang disebut-sebut sebagai upaya untuk menaikkan popularitas tersebut.

Tabel 1 Unit Analisis dalam Situs Pemberitaan detikNews

Hari dan Tanggal Terbit	Jam Terbit	Judul Berita
Kamis, 29 September 2011	08:45 WIB	Reshuffle, Siapa Bermasalah? Sang Menteri, dari Korupsi Hingga Selingkuh
Kamis, 29 September 2011	12:36 WIB	Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah

Kamis, 13 Oktober 2011	18:59 WIB	Proses Reshuffle terlalu Panjang Bak Sinetron
Selasa, 18 Oktober 2011	11:49 WIB	Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY
Senin, 24 Oktober 2011	11:56 WIB	Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY? Tak Ada harapan dari Paradoks Presiden

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data memiliki peranan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Data adalah informasi yang didapatkan melalui metode pengukuran tertentu, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah argumentasi yang menggambarkan realitas yang ada.

Teks berita tentang reshuffle kabinet di situs detikNews merupakan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan untuk melihat bagaimana media online mengkonstruksikan penurunan popularitas presiden SBY dalam pemberitaan dengan analisis framing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan komentar para pembaca situs berita sebagai data sekunder. Melalui komentar tersebut, dapat dilihat bagaimana respon masyarakat tentang pemberitaan tersebut, apakah cenderung negatif atau positif terhadap pelaksanaan reshuffle.

3.8 Alasan Pemilihan Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam pemberitaan ini bersumber dari situs detikNews yang memilih pemberitaan tentang reshuffle kabinet sebagai akibat penurunan popularitas presiden SBY di kalangan masyarakat. Pemberitaan ini dipilih karena mengandung nilai berita yang cukup tinggi, yang mengandung aspek aktualitas (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), keterkenalan (*prominence*), dampak (*consequence*), sehingga layak dimunculkan ke publik. Pemberitaan mengenai reshuffle ini tidak hanya menjadi agenda media tetapi menjadi agenda publik yang mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat, karena berkaitan

dengan kinerja di pemerintahan yang berdampak bagi kepentingan rakyat. Dilihat dari komentar yang diberikan pembaca detikNews, dapat dikatakan bahwa masyarakat cukup antusias untuk mengetahui perkembangan seputar reshuffle kabinet tersebut.

3.9 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984)⁶⁰, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis framing atau pbingkaian yang merujuk pada model framing Robert N. Entman.

Konsep framing Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Bentuk penonjolan bisa beragam, dengan menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas/isu.

1. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek

⁶⁰ Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta), hlm.91.

atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

2. Penonjolan aspek tertentu dari realitas berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu.

Dalam konsepsi Entman, framing merujuk pada pemberian defenisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Elemen-elemen dalam framing Entman terdiri atas *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

Tabel 2 Elemen-elemen dalam Framing Entman

<p><i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan master frame/bingkai paling utama. Elemen ini menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda dan bingkai ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda juga. • Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<p><i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan elemen untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (<i>what</i>), tetapi bisa juga siapa (<i>who</i>). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<p><i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan elemen yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefisian masalah, yang bertujuan untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. • Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut tergantung pada bagaimana peristiwa dilihat, dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. • Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Konsep pembingkaiian ini dipilih karena ingin melihat bagaimana tingkat objektivitas awak media dalam memberitakan tentang pelaksanaan reshuffle kabinet. Dalam penelitian ini, pembingkaiian digunakan untuk melihat apakah berita yang dihadirkan lahir dari fakta yang ada, bukan sekadar pilihan jurnalis, dan aspek mana yang lebih ditonjolkan media.

3.10 Keabsahan Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari empat kriteria, yakni derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*konfirmability*). Keabsahan menyangkut keyakinan bahwa analisa dan data penelitian benar-benar melambangkan realitas sosial yang terjadi. Keabsahan dari penelitian ini adalah :

1. *Dependability*, yaitu apakah peneliti mendapatkan hasil yang sama ketika mengulangi/mereplika proses penelitian tersebut. Penelitian ini dapat diandalkan karena kejadian tentang reshuffle yang diberitakan di media massa, merupakan realitas sebenarnya yang digambarkan, bukan rekayasa atau bentukan media.
2. *Transferability*, yakni nilai yang berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain? Sehingga orang lain dapat menggunakan kesimpulan yang dihasilkan dari sumber informasi jika menemui konteks, atau situasi yang identik. Penelitian lain yang bertemakan tentang kepemimpinan presiden SBY, dapat memanfaatkan data maupun informasi dalam penelitian ini, karena adanya kesamaan dalam konteks pembahasan.

3.11 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

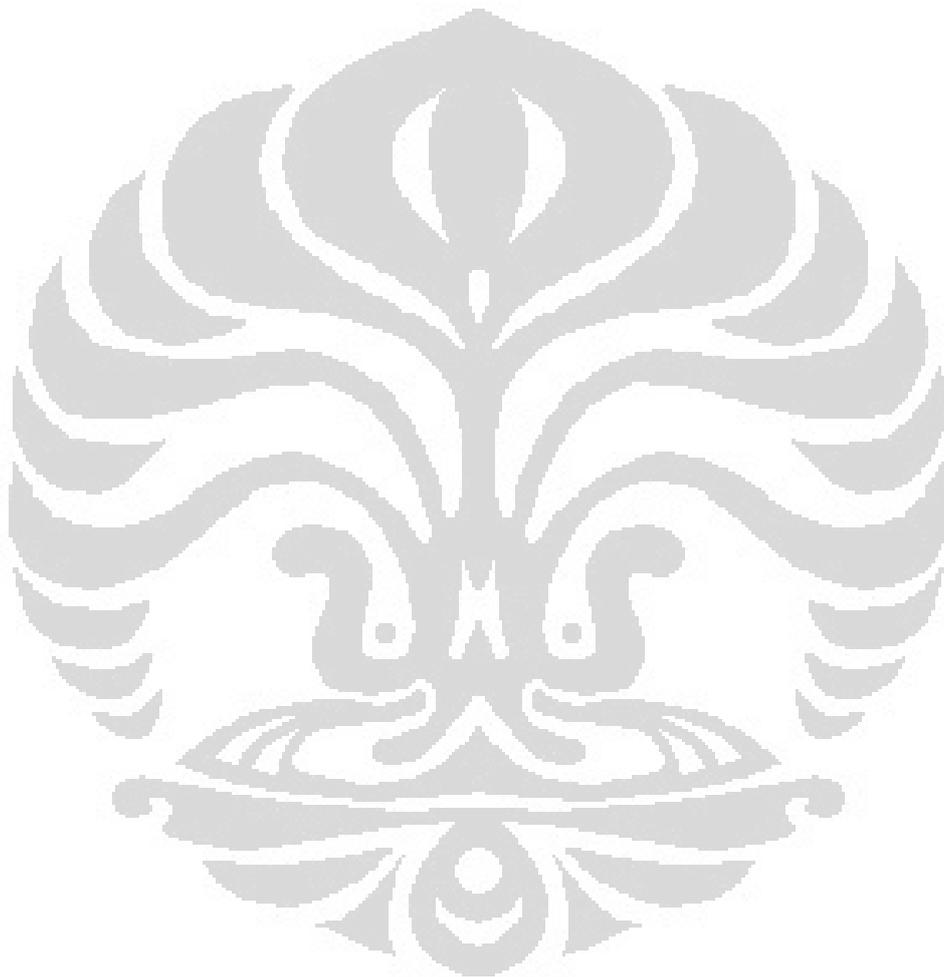
Setiap penelitian memiliki kelemahan dan keterbatasan sendiri. Kelemahan penelitian dapat dilihat dari metodologi yang digunakan, sedangkan keterbatasan dilihat dari kekurangan peneliti dalam melakukan penelitian.

3.11.1 Kelemahan Penelitian

Adapun yang menjadi kelemahan dari penelitian ini adalah tidak didukung dengan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang ideologi media secara jelas. Selain itu, penelitian ini hanya melihat pembingkaiian satu media saja, yaitu detikNews tanpa membandingkan dengan media lainnya, misalnya dengan media konvensional.

3.11.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya mencari literatur tentang kebijakan media online, sehingga peneliti menggunakan kebijakan media konvensional yang disesuaikan dengan karakter media online.



BAB 4

PROFIL MEDIA ONLINE

4.1 detik.com sebagai Situs Jurnalisme Online

detik.com merupakan sebuah portal web yang memuat berita aktual, dan menjadi salah situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dengan situs berita lainnya, detik.com hanya mempunyai edisi online dan menggantungkan pendapatannya dari bidang iklan. Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru muncul dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir detik.com. Situs ini didirikan oleh Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo) dan Didi Nugrahadi.

detik.com menjadi pelopor media massa yang menggunakan basis internet sebagai alat pemberitaannya. Sebagai situs pemberitaan berbasis internet, detik.com memiliki beberapa karakteristik dari media online, yaitu:

1. detik.com memiliki *server* atau penyedia jaringan yang memungkinkan semua orang yang terkoneksi dengan internet dapat melihat konten atau isi *website* tersebut. detik.com memanfaatkan koneksi antar komputer yang menyebabkan semua konten yang telah dipublish di situs dapat di *download* oleh setiap orang. Bahkan dengan semakin berkembangnya teknologi, kini detik.com telah memiliki situs khusus untuk ponsel, yakni m.detik.com.
2. detik.com sudah mengadopsi *interactivity* melalui fasilitas *comment* di setiap artikel yang dipublish, dan suara pembaca telah ditempatkan di halaman tersendiri. Meskipun suara pembaca yang dimuat harus melalui filterisasi dari redaksi detik.com, namun suara pembaca lebih efektif dibanding dengan koran harian, karena suara pembaca tersebut dipisah dalam sub-topik, sehingga bisa dimuat banyak tanpa masalah ruang.
3. detik.com juga memiliki forum yang memungkinkan semua orang dapat berpartisipasi aktif dalam memberi informasi kepada anggota forumnya, maupun bukan (khalayak pembaca). Walaupun diatur oleh moderator, namun

forum ini memberikan kebebasan kepada anggota untuk saling *sharing* berbagai macam hal, dari informasi hingga menjajakan dagangan.

4. detik.com memiliki sifat *multifaceted*, yakni sebuah media yang memiliki jenis komunikasi massa juga personal. Artinya, detik.com dapat diakses oleh semua orang, tetapi karena pembaca lebih aktif dalam mencari dan memilih berita maka seolah-olah seperti komunikasi interpersonal.

Selain sebagai pelopor media online, detik.com juga dianggap memiliki kelebihan lain sebagai salah satu jurnalisme online, diantaranya:

1. Informasi yang cepat dalam menyampaikan informasi yang didapat dari masyarakat. Dalam hal ini update informasi dilakukan selama 24 jam.
2. Berita yang dimuat, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
3. Mudah mengaksesnya, dan bisa dinikmati dengan berbagai macam perangkat teknologi baik computer maupun telepon genggam.
4. Memungkinkan interaksi pembaca melalui fasilitas forum pembaca, sehingga masing-masing pembaca bisa saling berdiskusi atas sebuah topik.
5. Didukung oleh wartawan yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi sehingga mampu menyuguhkan berita yang bermutu.

Dengan hadirnya detik.com sebagai salah satu sumber informasi terpercaya, masyarakat menjadi sedikit-banyak mengalami perubahan pola gaya hidup. Pembaca tidak perlu menyediakan waktu luang untuk membaca koran, tetapi bisa mendapatkannya secara online yang bisa diakses dimana saja. detik.com juga mengubah sistem sosial dan ekonomi. Dalam sistem sosial, pembaca lebih privat dalam membaca berita, dan dalam sistem ekonomi pembaca tidak perlu membayar berita karena sifat internet yang bisa dinikmati setiap orang.

detik.com sebagai media pemberitaan online pertama di Indonesia telah menjadi sebuah perubahan besar yang kemudian diikuti oleh kelompok media lainnya. Dengan berlandaskan *mediamorphosis*, media lain berusaha mengembangkan media mereka seperti yang dilakukan detik.com. Pada 3 Agustus 2011, detik.com secara resmi berada di bawah Trans Corp Company melalui proses akuisisi.

4.2 Tampilan Situs detik.com

Di halaman utama (*home*) pada baris atas situs detik.com terdapat beberapa link/rubrik (program kerja), diantaranya DetikNews, DetikFinance, DetikHot, Detiki-Net, DetikSport, DetikOto, DetikFood, DetikHealth, DetikFoto, DetikTV dan Indeks. Pada baris kedua juga terdapat rubrik Sepakbola, Surabaya, Bandung, Blog, Forum, Wolipop, Kolomkita, Travel, ACI, Buku Kuning, Mobile Application, dan Lokal Portal. Pada baris ketiga terdapat rubrik Iklan Baris, adPoint, Seremonia, Games, Sindikasi, Info Iklan, Suara Pembaca, Surat dari Buncit dan Redaksi, serta beberapa fasilitas lainnya. Selain itu, detik.com memudahkan pembacanya dengan memberikan kolom Detik Search untuk mencari berita atau info apapun yang pernah dipublish di website. detik.com juga dapat berbagai info atau berita di jejaring sosial pembaca seperti Facebook, Twitter dan sebagainya.



Gambar 2 Tampilan Situs Pemberitaan detik.com

Sumber : detikNews.com

Salah satu kanal detik.com yang menjadi unit observasi dalam penelitian adalah detikNews. detikNews menghadirkan berita terkini berupa general news, politik, hukum, dan kriminal. Informasi disampaikan dalam bentuk teks, foto, video, wawancara, maupun laporan khusus. detikNews juga memiliki fitur-fitur interaktif antara lain fotoanda, info anda dan pro kontra.



Gambar 3 Tampilan Situs detikNews

Sumber : detikNews.com

BAB 5
ANALISIS HASIL TEMUAN DATA
BERDASARKAN PEMBINGKAIAN MEDIA

Analisis pbingkaiian detikNews terhadap penurunan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemberitaan reshuffle kabinet, dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Analisis pbingkaiian penurunan popularitas Presiden SBY dalam pemberitaan reshuffle kabinet oleh detikNews.
2. Analisis respon publik tentang penurunan popularitas Presiden SBY dan kepemimpinannya pada pelaksanaan reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews.

5.1 Analisis Pbingkaiian Penurunan Popularitas Presiden SBY dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet oleh detikNews

**5.1.1 Berita: Reshuffle, Siapa Bermasalah?
Sang Menteri, dari Korupsi Hingga Selingkuh**

Ringkasan berita:

Reshuffle merupakan sebuah keharusan karena separuh kabinet SBY berkinerja parah. Jika Presiden SBY serius melakukan reshuffle, itu artinya SBY harus mengganti separuh dari menternya. Evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menemukan 17 dari 34 menteri atau 50 persen menteri berkinerja buruk.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapatkan setidaknya 10 kementerian bermasalah yang menyebabkan melorotnya kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY. Ada 4 kategori menteri bermasalah, yaitu:

1. Menteri yang tersangkut masalah dugaan korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Isu korupsi kementerian memberikan daya rusak paling besar bagi kabinet.

2. Menteri yang bermasalah dengan kebijakan negatif yang dikeluarkannya. Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin, dinilai lemah dalam perlindungan TKI. Kasus dipancungnya tenaga kerja wanita Ruyati di Arab Saudi menjadi contoh. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, memiliki kebijakan negatif karena pernah memberi remisi pada koruptor. Menteri Agama Suryadharma Ali, yang tidak mampu melindungi warga minoritas dalam kasus Ahmadiyah. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Darwin Z Saleh bermasalah dengan kasus tabung gas yang masih terjadi saat ini. Menteri Pertanian Suswono yang sulit merealisasikan harga bahan pokok yang terjangkau.
3. Menteri yang memiliki 'cacat moral', yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh, yang diduga memiliki masalah keluarga dengan munculnya tuduhan selingkuh dengan wanita lain. Jika komitmen dengan istri saja dilanggar, bagaimana komitmen dengan rakyat yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan menteri?
4. Menteri yang memiliki masalah kesehatan yakni Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang diisukan terkena kanker paru-paru dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang masuk rumah sakit karena diduga sakit jantung.

Sumber istana mengungkap hanya 4 menteri yang bakal dicopot, 4 menteri lainnya akan digeser dan satu menteri masih dalam pertimbangan. Mereka yang bakal dicopot, menurut sang sumber adalah Mustofa Abubakar, Darwin Zahedy Saleh, Agus Martowardojo, dan Freddy Numberi, dan yang akan dirotasi adalah Muhaimin, Tifatul Sembiring serta Andi Mallarangeng. Bila reshuffle hanya mengenai sedikit menteri, maka perombakan SBY pun dipertanyakan, apalagi Muhaimin dan Andi yang tersangkut kasus paling merusak popularitas SBY hanya digeser posisinya. Ini akan memunculkan anggapan bahwa reshuffle hanya bersifat kosmetik.

Reshuffle pun sebenarnya belum cukup, Presiden SBY seharusnya mengungkapkan apa alasan pergantian menteri tersebut. Dalam laporan UKP4

sangat jelas capaian-capaian apa yang telah dilakukan para menterinya, juga target-target yang belum diselesaikan. Data tersebut harusnya diungkapkan ke publik, agar tidak menimbulkan pertanyaan. Penilaian itu juga bisa dijadikan pegangan bagi menteri yang baru dilantik sehingga mereka tahu apa saja yang belum tercapai menteri sebelumnya.

Sejumlah kalangan menilai, kalau SBY mempertahankan komposisi keterwakilan parpol sama saja SBY melakukan resuffle setengah hati. SBY diduga akan bermain aman dengan menggeser beberapa pos menteri dan tukar menteri yang tidak perform dengan kader partai yang sama. SBY akan menggunakan data-data dan menerima masukan dari UKP4. Dengan cara ini, yang terjadi persaingan atau sikut-sikutan di internal partai koalisi yang bersaing untuk menjadi menteri. Sementara hubungan SBY dengan parpol-parpol koalisi tidak terpengaruh.

Tabel 3 Framing Entman Berita 1

<p><i>Define Problems</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 kementerian menyebabkan melorotnya kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY. • Menteri yang tersangkut masalah dugaan korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Isu korupsi kementerian memberikan daya rusak paling besar bagi kabinet. • Menteri yang bermasalah dengan kebijakan negatif yang dikeluarkannya. Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin, dinilai lemah dalam perlindungan TKI. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, memiliki kebijakan negatif karena pernah memberi remisi pada koruptor.
-------------------------------	---

	<p>Menteri Agama Suryadharma Ali, yang tidak mampu melindungi warga minoritas dalam kasus Ahmadiyah. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Darwin Z Saleh bermasalah dengan kasus tabung gas yang masih terjadi saat ini. Menteri Pertanian Suswono yang sulit merealisasikan harga bahan pokok yang terjangkau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri yang memiliki 'cacat moral', yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh, yang diduga memiliki masalah keluarga dengan munculnya tuduhan selingkuh dengan wanita lain. Jika komitmen dengan istri saja dilanggar, bagaimana komitmen dengan rakyat yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan menteri? • Menteri yang memiliki masalah kesehatan yakni Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang diisukan terkena kanker paru-paru dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang masuk rumah sakit karena diduga sakit jantung.
<i>Diagnose Causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah kalangan menilai, kalau SBY mempertahankan komposisi keterwakilan parpol sama saja SBY melakukan resuffle setengah hati. • SBY diduga akan bermain aman dengan menggeser beberapa pos menteri dan tukar

	<p>menteri yang tidak perform dengan kader partai yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila reshuffle hanya mengenai sedikit menteri, maka perombakan SBY pun dipertanyakan, apalagi Muhaimin dan Andi yang tersangkut kasus paling merusak popularitas SBY hanya digeser posisinya. Ini akan memunculkan anggapan bahwa reshuffle hanya bersifat kosmetik.
<i>Make Moral Judgement</i>	<p>Dengan cara tukar menteri yang tidak perform dari kader yang sama, yang terjadi persaingan atau sikut-sikutan di internal partai koalisi yang bersaing untuk menjadi menteri. Sementara hubungan SBY dengan parpol-parpol koalisi tidak terpengaruh.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Reshuffle merupakan sebuah keharusan karena separuh kabinet SBY berkinerja parah. Jika Presiden SBY serius melakukan reshuffle, itu artinya SBY harus mengganti separuh dari menterinya.</p>

Analisis:

Dalam berita yang berjudul **Reshuffle, Siapa Bermasalah? Sang Menteri, dari Korupsi Hingga Selingkuh**, detikNews memframe penurunan popularitas SBY terjadi karena kinerja 10 kementerian yang tidak berjalan maksimal. Teks ini memilih kata “melorot” untuk menggambarkan penurunan secara cepat. Teks menonjolkan **aspek korupsi** di kementerian sebagai masalah utama yang **memberikan daya rusak bagi kabinet SBY** (*define problems*). Korupsi menjadi suatu penyakit para pejabat pemerintahan, yang tidak mampu diatasi hingga kini. Korupsi menjadi semacam budaya turun temurun di pemerintahan, yang menjadi hal biasa di kalangan pejabat.

Dalam pemberitaan ini detikNews melihat sisi kepemimpinan SBY dalam mengatasi kinerja buruk menterinya tersebut melalui isu reshuffle. detikNews menunjukkan kepemimpinan SBY yang hanya ingin menyenangkan elite politik sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari koalisi, tanpa memperdulikan ‘perasaan’ rakyat yang menjadi korban dari keputusannya. detikNews membingkai bahwa reshuffle yang dilakukan SBY hanyalah **kosmetik belaka**, untuk mengelabui rakyat Indonesia (*diagnose causes*). Pemilihan kata “kosmetik” yang berarti bahan untuk mempercantik sesuatu, ditujukan untuk menonjolkan ketidakseriusan presiden SBY. Ini terlihat ketika menteri yang terkena kasus korupsi, hanya digeser saja posisinya. Padahal, kasus korupsi adalah sebab utama melorotnya kepercayaan publik terhadapnya.

Reshuffle tidak semata-mata memperhatikan kemampuan calon menteri, namun mempertimbangkan komposisi keterwakilan parpol. Penilaian yang diberikan presiden SBY atas masalah tersebut adalah dengan **memilih jalan aman**. Mengambil sikap yang **seolah-olah menyenangkan publik**, namun hasilnya hanya **untuk mendapatkan dukungan parpol koalisi** (*make moral judgement*).

Dari teks berita terlihat bahwa aspek yang menyebabkan penurunan popularitas SBY dibingkai pada *diagnose causes* seperti, **buruknya gaya kepemimpinan SBY** dalam menyikapi kemelut yang terjadi di kabinetnya, **pelaksanaan reshuffle yang bersifat kosmetik**, dan **ketidaktegasan dalam menindak menteri bermasalah khususnya yang terlibat dalam kasus korupsi**.

5.1.2 Berita : Reshuffle, Siapa Bermasalah?

Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah

Ringkasan Berita:

Reshuffle kabinet tidak berarti penting bagi jalannya pemerintahan jika Presiden SBY justru tidak mengubah atau mengoreksi diri. Sorotan atas reshuffle tidak hanya pada menteri yang bermasalah tapi juga mengarah pada presiden. Banyak menteri yang kewalahan melaksanakan program kerjanya, yang kemudian menular pada bawahannya, dari level eselon I, II, dan III. Buruknya kinerja

menteri tidak bisa dilepaskan dari atasannya, yakni Presiden SBY, para menteri hanya menjalankan instruksi presiden.

Sikap SBY yang tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahan mengakibatkan para menteri bekerja seenaknya saja. Apalagi mereka merasa dilindungi parpol masing-masing sebagai bagian dari koalisi. Banyak kalangan yang mencurigai reshuffle dilakukan hanya untuk memperbaiki citra SBY. Apalagi bila reshuffle hanya dilakukan terhadap sedikit menteri. Reshuffle yang dilakukan SBY juga terlambat, dimana masa pemerintahan SBY dalam perhitungan politik, cuma setahun, dengan alasan pada tahun 2012 mendatang, partai politik telah mengambil ancang-ancang untuk kembali siap bertarung pada pemilu dan pilpres 2014.

Lima puluh persen pos kementerian layak untuk diganti, dan untuk itu, SBY disarankan untuk mengambil pembantunya dari kalangan profesional. Namun diduga itu tidak akan terjadi karena unsur dalam pemerintahan dan partainya banyak masalah. Reshuffle yang dilakukan oleh SBY tidak menjanjikan hal yang substantif dalam perubahan kinerja pemerintah. Reshuffle hanya untuk memuaskan aspirasi dari kekuasaan saja. Kalau ternyata setelah diganti tidak ada perubahan, maka Presiden dan Wapresnya yang bermasalah.

Bila SBY bisa tegas dan punya keberanian, seharusnya SBY mengganti kabinet dengan orang-orang yang profesional di bidangnya dan keluar dari sekat-sekat kepentingan partai. Tapi jika SBY hanya ingin bermain aman, kinerja pemerintahan SBY tidak akan berubah, karena hanya mementingkan kepentingan politik. SBY disarankan melakukan reshuffle secara radikal khususnya pada pos kementerian yang membawahi hukum, ekonomi, juga pada pada pos-pos hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang penting kriteria menteri terpilih adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah, jangan hanya melaporkan dan menambah masalah.

Tabel 4 Framing Entman Berita 2

<i>Define Problems</i>	Sikap SBY yang tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahan mengakibatkan para menteri bekerja seenaknya saja.
------------------------	--

<i>Diagnose Causes</i>	<p>Banyak menteri yang kewalahan melaksanakan program kerjanya, yang kemudian menular pada bawahannya, dari level eselon I, II, dan III. Buruknya kinerja menteri tidak bisa dilepaskan dari atasannya, yakni Presiden SBY, para menteri hanya menjalankan instruksi presiden.</p>
<i>Make Moral Judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap SBY yang tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahan mengakibatkan para menteri bekerja seandainya saja. Apalagi mereka merasa dilindungi parpol masing-masing sebagai bagian dari koalisi. • Reshuffle yang dilakukan SBY juga terlambat, dimana masa pemerintahan SBY dalam perhitungan politik, cuma setahun, dengan alasan pada tahun 2012 mendatang, partai politik telah mengambil ancang-ancang untuk kembali siap bertarung pada pemilu dan pilpres 2014.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lima puluh persen pos kementerian layak untuk diganti, dan untuk itu, SBY disarankan untuk mengambil pembantunya dari kalangan professional. Namun diduga itu tidak akan terjadi karena unsur dalam pemerintahan dan partainya banyak masalah. • Seharusnya SBY mengganti kabinet dengan orang-orang yang profesional di bidangnya dan keluar dari sekat-sekat kepentingan partai.

	<ul style="list-style-type: none"> • SBY disarankan melakukan reshuffle secara radikal khususnya pada pos kementerian yang membawahi hukum, ekonomi, juga pada pada pos-pos hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang penting kriteria menteri terpilih adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah, jangan hanya melaporkan dan menambah masalah.
--	--

Analisis:

Dari berita yang berjudul **Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah**, penurunan popularitas SBY digambarkan dari ketidaktegasan SBY dalam mengorganisir dan mengontrol kabinet yang dipimpinnya (*define problems*). **Presiden SBY digambarkan sebagai aktor yang menyebabkan munculnya masalah tersebut.** Kegagalan menteri merupakan gambaran dari kegagalan presiden, karena kinerja menteri tidak bisa dilepaskan dari atasannya (*diagnose causes*). Jika kemudian presiden menyesal dengan hasil kinerja menterinya, ini **menunjukkan buruknya kepemimpinan SBY.**

detikNews membingkai bahwa kegagalan SBY sebagai pemimpin masih terlihat dalam proses pelaksanaan reshuffle. Terlihat dari banyaknya sorotan terhadap SBY, yang menduga bahwa reshuffle semata-mata hanya untuk memperbaiki citranya. Seharusnya presiden SBY tidak perlu melakukan politik pencitraan dalam 2 tahun sisa pemerintahannya, karena ini menjadi periode pemerintahannya yang terakhir (*make moral judgement*). Ketika kinerja kabinet hasil reshuffle masih buruk, maka detikNews membingkai **bahwa pihak sebenarnya yang bermasalah adalah presiden itu sendiri.**

Dari hasil pembedingkaian teks berita, disimpulkan bahwa aspek yang menyebabkan penurunan kepercayaan dan penurunan popularitas SBY dimata publik adalah **ketidaktegasan SBY** dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga menteri bekerja seenaknya saja, pelaksanaan reshuffle yang terlambat,

reshuffle yang hanya **memperlihatkan politik pencitraan** dan sikap **tidak profesional** dalam memilih kabinet yang rekam jejak kerjanya jelas.

5.1.3 Proses Reshuffle Terlalu Panjang Bak Sinetron

Ringkasan berita:

Wacana reshuffle sudah cukup lama bergulir dan menjadi konsumsi publik, sehingga dinilai seperti adegan dalam sinetron yang terdiri dari beberapa babak. Karakteristik SBY sangat memperhatikan setiap proses, seolah ingin sempurna dan melibatkan publik, namun output dari proses tersebut terbukti tidak terlalu menggembirakan. SBY tersandera oleh 'permainan' sendiri, karena proses yang terlalu lama sehingga memberi ruang bagi manuver atau intervensi politik (terutama dari partai) yang justru akan mereduksi kekuasaan prerogatif presiden.

Kerugian dan lamanya isu reshuffle bergulir, memunculkan spekulasi yang semakin liar karena ketidakjelasan parameter yang digunakan dalam evaluasi atau reshuffle. Jika parameternya kinerja, presiden sebenarnya sudah punya instrumen/unit kerja (UKP4). Namun, parameter tersebut tidak dibuka ke publik, sementara prosesnya dibuat seolah-olah terbuka dan 'ingin' melibatkan publik. Selain hasil (UKP4), presiden juga memiliki fakta integritas yang menjadi kontrak para menteri ketika diangkat.

Diduga dua parameter tersebut tidak akan menjadi pertimbangan SBY saat melakukan reshuffle. Pengalaman reshuffle di periode sebelumnya, aspek politis lebih dominan yang menyebabkan tarik ulur dan lamanya proses di setiap reshuffle. Presiden mempertimbangkan perimbangan kekuatan partai di parlemen serta mengakomodasi keinginan para pengendali partai. Jika menteri masih disokong kuat oleh partainya, apalagi kalau sang menteri pengendali di partai, maka kecil kemungkinan kena reshuffle kendati pun bermasalah secara kinerja atau akseptabilitas dari publik.

Sebelumnya, SBY mengatakan kabinet yang dibentuk semacam kabinet kerja. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun dalam politik riil ada etika koalisi dan kewajiban yang harus dilakukan. Meskipun meminta pandangan

pemimpin parpol koalisi, tetapi punya kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik.

Tabel 5 Framing Entman Berita 3

<i>Define Problems</i>	<p>SBY tersandera oleh 'permainan' sendiri, karena proses reshuffle yang terlalu lama sehingga memberi ruang bagi manuver atau intervensi politik (terutama dari partai) yang justru akan mereduksi kekuasaan prerogatif presiden.</p>
<i>Diagnose Causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik SBY sangat memperhatikan setiap proses, seolah ingin sempurna dan melibatkan publik, namun output dari proses tersebut terbukti tidak terlalu menggembirakan. SBY tersandera oleh 'permainan' sendiri, karena proses yang terlalu lama sehingga memberi ruang bagi manuver atau intervensi politik (terutama dari partai) yang justru akan mereduksi kekuasaan prerogatif presiden. • Kerugian dan lamanya isu reshuffle bergulir, memunculkan spekulasi yang semakin liar karena ketidakjelasan parameter yang digunakan dalam evaluasi atau reshuffle. • Pengalaman reshuffle di periode sebelumnya, aspek politis lebih dominan yang menyebabkan tarik ulur dan lamanya proses di setiap reshuffle.
<i>Make Moral Judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika parameternya kinerja, presiden sebenarnya sudah punya instrumen/unit kerja (UKP4). Namun, parameter tersebut

	<p>tidak dibuka ke publik, sementara prosesnya dibuat seolah-olah terbuka dan 'ingin' melibatkan publik. Selain hasil (UKP4), presiden juga memiliki fakta integritas yang menjadi kontrak para menteri ketika diangkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden mempertimbangkan perimbangan kekuatan partai di parlemen serta mengakomodasi keinginan para pengendali partai.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Dalam pelaksanaan reshuffle tersebut, SBY mempertimbangkan etika koalisi dan kewajiban lain yang harus dilakukan.

Analisis:

Dari berita yang berjudul **Proses Reshuffle Terlalu Panjang Bak Sinetron**, penurunan popularitas SBY terlihat dari sikap kepemimpinan SBY. Pelaksanaan reshuffle yang diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya, justru menimbulkan polemik yang berkepanjangan. SBY dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dalam membuat keputusan terkait dengan hasil reshuffle. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan reshuffle selalu **diimbangi aspek politik untuk menjaga politik pencitraan dan perimbangan kekuatan SBY di parlemen (*diagnose causes*)**. Hal tersebut dilakukan, agar SBY tetap berada diposisi aman, tanpa merasa terganggu dengan ancaman dari parlemen yang ingin menjatuhkannya.

Sebagai pemimpin yang seyogianya menjadi teladan, detikNews membingkai bahwa presiden SBY **seharusnya mampu bersikap tegas** dalam melengserkan menteri yang kinerja buruk, karena keputusannya tersebut dijamin oleh undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya SBY justru hanya **mengacu pada etika dan perjanjian parpol**. Media membingkai pelaksanaan reshuffle

seperti sinetron, yang identik dengan alur cerita yang terlalu panjang sehingga membosankan, dan kadangkala mengangkat cerita yang tidak masuk akal.

Dalam teks berita terlihat bahwa aspek yang menyebabkan penurunan popularitas SBY adalah **pelaksanaan reshuffle yang terlalu panjang** dan memasukkan **aspek politis** dan **kekuatan parlemen** di dalamnya, **ketidakjelasan parameter** pelaksanaan reshuffle, dan karakteristik SBY yang ingin **menyenangkan banyak pihak** namun justru tersandera dengan permainannya.

5.1.4 Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY

Ringkasan berita:

Seorang presiden tentu menginginkan stabilitas dalam pemerintahannya, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini mengingat SBY memerlukan dukungan publik dan parpol koalisi. Presiden SBY dinilai telah meramu politik pencitraan dan kompromi untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menurut Hanta Yudha, SBY ingin memenuhi keinginan publik tapi tidak berani melawan kungkungan parpol dalam koalisi. Maka diangkat sejumlah wamen agar partai bisa mengendalikan partai. Kavling menteri kebanyakan orang politik. Politik pencitraan termasuk audisi menteri dilakukan untuk memuaskan rakyat melalui dukungan vertikal. Dukungan horizontal dengan menggunakan politik kompromi sehingga terlihat transaksional.

Penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak terlalu kentara dalam melakukan reshuffle kabinet. Hal itu terlihat dari menteri yang diindikasikan bermasalah secara hukum belum diganti. Penunjukkan wakil menteri dilihat sebagai politik main aman ala SBY. Tujuan penunjukkan wamen, sebenarnya untuk menjaga kabinet meskipun ada risiko disharmoni antara menteri dan wakil menteri. Mendekati pemilu mendatang, bisa jadi menteri asal parpol koalisi akan turut berjibaku demi kepentingan partainya, untuk menghindari hal itu perlu wamen untuk memastikan jalannya kabinet tetap aman.

Ada tiga kalkulasi kekuatan partai di parlemen dan perimbangan politik yang merupakan representasi partai atau daerah, evaluasi kedisiplinan atau manuver partai di koalisi, dan dinamika internal atau faksionalisasi di partai-partai koalisi. *Pertama*, SBY selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah ketimbang dari non-parpol. *Kedua*, yang paling bermanuver dulu era SBY-JK adalah Golkar, tetapi menariknya justru selalu mendapatkan tambahan kursi. Hal inilah yang berbeda perlakuan SBY terhadap PKS. *Ketiga*, SBY hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tidak kuat lagi di partai atau tidak didukung lagi oleh partainya.

Golkar selalu diberi tambahan kursi di kabinet namun PKS justru terancam dikurangi jatah kursi menteri. Alasannya, kalkulasi kekuatan parlemen, sebab secara kuantitas Golkar 20% di parlemen, PKS hanya 10%, secara kualitas politisi Golkar dianggap lebih piawai dan berpengalaman berpolitik ketimbang PKS.

Tabel 6 Framing Entman Berita 4

<i>Define Problems</i>	Presiden SBY dinilai telah meramu politik pencitraan dan kompromi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
<i>Diagnose Causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SBY ingin memenuhi keinginan publik tapi tidak berani melawan kungkungan parpol dalam koalisi. • SBY selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah ketimbang dari non-parpol. • Golkar sebagai partai yang bermanuver di era SBY-JK selalu mendapatkan tambahan kursi. Terlihat ada perbedaan perlakuan SBY antara Golkar dan PKS. • SBY hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tidak kuat lagi di partai atau tidak didukung lagi oleh partainya.

<i>Make Moral Judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak terlalu kentara dalam melakukan reshuffle kabinet. Hal itu terlihat dari menteri yang diindikasikan bermasalah secara hukum belum diganti • Politik pencitraan termasuk audisi menteri dilakukan untuk memuaskan rakyat melalui dukungan vertikal. Dukungan horizontal dengan menggunakan politik kompromi sehingga terlihat transaksional. • Golkar selalu diberi tambahan kursi di kabinet namun PKS justru terancam dikurangi jatah kursi menterinya. Alasannya, kalkulasi kekuatan parlemen, sebab secara kuantitas Golkar 20% di parlemen, PKS hanya 10%, secara kualitas politisi Golkar dianggap lebih piawai dan berpengalaman berpolitik ketimbang PKS. • Penunjukkan wakil menteri dilihat sebagai politik main aman ala SBY. Tujuan penunjukkan wamen, sebenarnya untuk menjaga kabinet meskipun ada risiko disharmoni antara menteri dan wakil menteri.
<i>Treatment Recommendation</i>	Maka diangkat sejumlah wamen agar partai bisa mengendalikan partai.

Analisis:

Dalam berita yang berjudul **Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY**, penurunan popularitas SBY terlihat dari pola

kepemimpinan SBY dalam pelaksanaan reshuffle kabinet. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanannya dalam menjalankan sisa pemerintahan, SBY mengangkat banyak wakil menteri di kementerian yang bermasalah.

detikNews menempatkan posisi presiden SBY sebagai pelaku (aktor) yang menyebabkan penurunan kepercayaan dan popularitasnya dihadapan publik. Keputusannya yang mengangkat banyak wakil menteri, dan tidak melengserkan menteri yang tidak cakap dalam pekerjaannya, **memperlihatkan buruknya kepemimpinan SBY** (*diagnose causes*). detikNews membingkai bahwa politik pencitraan yang ditunjukkan SBY, adalah bentuk penyelesaian yang dipilihnya terhadap masalah yang terjadi.

Dalam teks berita, aspek yang terlihat menjadi penyebab menurunnya popularitas SBY diantaranya **ramuan politik pencitraan dan kompromi** untuk stabilitas pemerintahan, **ketidakberanian melawan kungkungan parpol koalisi**, **tidak tegas** dalam menindak menteri yang bermasalah dalam kabinet, **pertimbangan kalkulasi kekuatan** di parlemen, dan **pengangkatan wakil menteri** di kementerian yang tidak bekerja secara maksimal.

5.1.5 Berita: Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY?

Tak Ada Harapan dari paradoks Presiden

Ringkasan berita:

Kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II benar-benar membuat kecewa Presiden SBY. Ketua DPP PD bidang Bappenas menuturkan, selama dua tahun pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya, SBY telah memberikan kepercayaan penuh pada para menteri terutama yang berasal dari parpol koalisi. Kini SBY menyesalinya karena ternyata kinerja mereka tidak baik. Lewat reshuffle nanti, SBY akan mengambil alih tongkat komando yang diberikan kepada menteri dari parpol koalisi tersebut, terutama yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti Kemenkes, Kemendiknas, dan urusan alutsista. Setelah reshuffle, SBY akan berada di garis depan dalam mencegah terjadinya perampokan APBN.

Banyak kalangan justru tidak yakin reshuffle akan memberikan perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja kabinet. SBY diprediksi tidak akan berani bersikap radikal melakukan perubahan, bakal akomodatif dalam melakukan reshuffle, dan tidak akan berani mencopot sejumlah menteri meskipun sang menteri berkinerja buruk. Karena SBY ingin mempertahankan dukungan dari banyak pihak dan tidak ingin memiliki musuh setelah reshuffle.

Indikasi SBY berupaya menyenangkan banyak pihak terlihat dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerian. SBY tidak mencopot menteri yang kementeriannya tidak bekerja maksimal, justru menempatkan wakil menteri. Padahal jika mau tegas, SBY sebenarnya punya kewenangan memecat menteri sesuai keinginannya seperti dijamin undang-undang. Partai koalisi akan menerima pemecatan itu asal didasarkan penilaian yang jelas.

Sikap SBY yang berusaha hati-hati dalam mengganti menteri membuat proses reshuffle berjalan panjang dan menjadi gaduh. Bahkan untuk mencoret nama satu orang menteri saja SBY harus minta pendapat ke sejumlah pihak, terutama di lingkaran dekatnya. Ada satu orang menteri di bidang ekonomi yang menurut penilaian UKP4 kurang maksimal. SBY sempat ingin menggantinya, tapi ketika orang di ring-1 tidak sependapat SBY batal mencoretnya. Gaya kepemimpinan SBY yang terlalu banyak meminta pertimbangan termasuk dalam menjalankan pemerintahan membuat banyak kalangan menyalahkan SBY atas buruknya kinerja KIB II. Janji SBY yang akan menyetop perampokan APBN lewat reshuffle juga disangsikan.

Pernyataan SBY paradoks dengan tindakannya. SBY mengatakan akan menyetop perampokan APBN, namun di satu sisi, ia justru mengangkat beberapa wakil menteri, yang tentunya akan menyedot dana APBN. Jika SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN seharusnya dalam pergantian menteri, SBY berpatokan pada audit BPK terhadap sejumlah kementerian.

Tabel 7 Framing Entman Berita 5

<i>Define Problems</i>	SBY diprediksi tidak akan berani bersikap radikal melakukan perubahan, bakal akomodatif dalam melakukan reshuffle, dan tidak akan berani mencopot sejumlah menteri meskipun sang menteri berkinerja buruk. Karena SBY ingin mempertahankan dukungan dari banyak pihak dan tidak ingin memiliki musuh setelah reshuffle.
<i>Diagnose causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap SBY yang berusaha hati-hati dalam mengganti menteri membuat proses reshuffle berjalan panjang dan menjadi gaduh. Bahkan untuk mencoret nama satu orang menteri saja SBY harus minta pendapat ke sejumlah pihak, terutama di lingkaran dekatnya • Gaya kepemimpinan SBY yang terlalu banyak meminta pertimbangan termasuk dalam menjalankan pemerintahan membuat banyak kalangan menyalahkan SBY atas buruknya kinerja KIB II. • Pernyataan SBY paradoks dengan tindakannya. SBY mengatakan akan menyetop perampokan APBN, namun di satu sisi, ia justru mengangkat beberapa wakil menteri, yang tentunya akan menyedot dana APBN.
<i>Make moral judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikasi SBY berupaya menyenangkan banyak pihak terlihat dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerian.

	<ul style="list-style-type: none"> • SBY tidak mencopot menteri yang kementeriannya tidak bekerja maksimal, justru menempatkan wakil menteri. Padahal jika mau tegas, SBY sebenarnya punya kewenangan memecat menteri sesuai keinginannya seperti dijamin undang-undang.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SBY akan mengambil alih tongkat komando yang diberikan kepada menteri dari parpol koalisi tersebut, terutama yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti Kemenkes, Kemendiknas, dan urusan alutsista. • Jika SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN seharusnya dalam pergantian menteri, SBY berpatokan pada audit BPK terhadap sejumlah kementerian.

Analisis:

Berita yang berjudul **Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY? Tak Ada Harapan dari Paradoks Presiden**, detikNews memposisikan presiden SBY sebagai aktor (pelaku) yang menyebabkan masalah mengapa kepercayaan dan popularitas publik terhadapnya malah menurun. Dalam proses reshuffle, terlihat gambaran kepemimpinan SBY yang memberikan hasil yang tidak maksimal, seperti pengangkatan wakil menteri. Sama seperti judul teks ini, terlihat bahwa apa yang diucapkan presiden paradoks (bertentangan) dengan apa yang dilakukannya (*diagnose causes*). Tindakan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang pemimpin, yang seharusnya menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya.

Atas semua permasalahan tersebut, presiden SBY memberikan penyelesaian dengan menyatakan diri akan mengambil alih tongkat komando yang diberikan kepada parpol koalisi, terutama berhubungan dengan rakyat (*treatment recommendation*). detikNews dalam pemberitaan ini memberikan rekomendasi

agar SBY berani memecat menteri yang bermasalah, karena ia memiliki hak seperti dijamin undang-undang. Presiden SBY juga seharusnya mengambil sikap tegas terhadap menteri-menteri yang kementeriannya bermasalah dalam hasil audit BPK. Hal ini akan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan APBN dari perampokan.

Dalam teks ini terlihat bahwa aspek yang menyebabkan menurunnya popularitas publik terhadapnya adalah **ketidaktegasan dalam pelaksanaan reshuffle** dimana SBY tidak berani mencopot menteri yang bermasalah, karakteristiknya yang **seolah-olah ingin menyenangkan publik namun gagal melaksanakannya**, pelaksanaan **reshuffle yang berjalan lama** dan menimbulkan kegaduhan, **gaya kepemimpinan yang buruk**, dan **pengangkatan wakil menteri** yang justru menyedot APBN.

5.2 Pembingkai terhadap Keseluruhan Pemberitaan detikNews mengenai Penurunan Popularitas Presiden SBY

Dari keseluruhan pemberitaan tentang analisis penurunan popularitas presiden SBY dengan menggunakan framing Entman, penulis menemukan beberapa hal penting. Berdasarkan 4 unsur pembingkai dari Entman, maka ada tiga unsur dari Entman yang menjawab permasalahan utama dari berita yang dibingkai oleh detiknews. Unsur tersebut mengindikasikan adanya penurunan popularitas SBY dalam pemberitaan reshuffle kabinet, yakni:

1. Berdasarkan *define problem*, detikNews mengidentifikasi bahwa penurunan popularitas SBY disebabkan oleh ketidaktegasannya dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga menimbulkan berbagai polemik seperti buruknya kinerja kabinetnya.
2. Berdasarkan *make moral judgement*, detikNews membingkai bahwa penurunan popularitas SBY disebabkan oleh pelaksanaan reshuffle yang mempertimbangkan keterwakilan parpol koalisi dalam mempertahankan kekuatan di parlemen, didominasi oleh aspek politis, menonjolkan politik pencitraan untuk mendapatkan dukungan publik dan parpol dalam mempertahankan stabilitas pemerintahan.

3. Berdasarkan *treatment recommendation*, detikNews merekomendasikan agar dalam pelaksanaan reshuffle kabinet, presiden SBY memilih menteri dari kalangan profesional, dan harus berani keluar dari kungkungan kekuatan partai politik.

5.3 Analisis respon publik tentang penurunan popularitas Presiden SBY dinilai dari kepemimpinannya pada pelaksanaan reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews.

1. **Asrul Pranto Putra Rambe.** Kalau saya yg salah presidennya. krn sebagai **pemimpin yg baik harus tegas**..negara ini bukan sinetron....akui kesalahan ente bos....pemimpin yg baik salah satunya mengaku salah jika memang salah...jgn tuduh org lain...
2. **CYPRI.** Sampai kapan SBY mempertahankan mentri-mentri yg sdh tdk mampu, kalau sekedar **digeserpun adalah hanya menyenangkan Partai koalisi tetapi rakyat di korbankan.**
3. **Kemping.com.** Memang sudah seharusnya yang diganti **itu silebay lemot.. Otaknya banyak pertimbangan kearah pribadi** sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat, urusan rakyat nomor sekian yang penting langgeng 5 tahun adapun hasilnya nol, bodoh amat.. ya bey..lebay
4. **Handoko Halim.** Presiden SBY sangat lihai mengatur emosi rakyat, saat pilpres 2004; **dia terpilih karena citra bukan kinerja**, begitu juga 2009; saat ini rakyat sedang gencar2nya memperhatikan korupsi yg dilakukan kader2 Demokrat, **supaya perhatian rakyat tdk terpusat kejahatan kader Demokrat**, rakyat disuguhi sinetron yg memuakkan dan bertele tele reshufell kabinet, sungguh sangat licik tindakan ini, Kasihan Indonesia
5. **Aman.damai66.** Presiden di era setelah order baru, kekuasaannya tdk kuat lagi karena kekuasaan sdh terbagi di banyak tempat Parlemen, Pers, LSM dll. **Parlemen sangat kuat dan bahkan bisa mengancam ancam Presiden bila Parpolnya kehilangan kursi Menteri**, itulah real politik,

contoh Alm Presiden Gusdur dilengserkan oleh Parlemen (DPR) karena semua fraksi sdh sepakat melengserkan Alm Gusdur dari kursi Presiden, meskipun beliau sampai saat ini tdk dapat dibuktikan kesalahannya. Sebagai rakyat saya hanya mengharapkan para tokoh di RI ini bersama sama mampu menata ulang kembali suasana politik yg kondusif sehingga semua program Pemerintah utk kesejahteraan rakyat memperoleh dukungan sepenuhnya dari Parlemen.

6. **Tengguli.** O.jadi selama ini presidennya melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. **Visi tidak jelas, pengarahan dan pemantauan dan evaluasi terus menerus tidak ada.** Kalau begitu bukan presiden/pemimpin namanya. Tidak heran kalau selama ini beliau banyak waktu untuk mengarang lagu dan menyanyi. Aneh..
7. **Samson.roso.** Kecewa dg kerja mentri yg sdh dapat kepercayaan penuh ? Akan ambil komando di kementrian setelah resuffle ? Ini benar2 ucapan seorang **pemimpin yg tdk bertanggung jawab.** Tanggung jawab akhir pemerintah ada di presiden. **Presiden harus monitor terus pencapaian setiap kementrian, memberikan arahan, menengahi konflik antar mentri termasuk menegur jika ada yg melenceng.** Lha, apa selama ini mentri2 itu disuruh jalan sendiri ? Contoh kasus, Sea Games besok ini. Apa sby tdk malu fasilitas Sea Games yg belum rampung ? Emang itu tugas panitia dan Menpora, tapi ini kan forum internasional. Publik LN taunya Indonesia jadi tuan rumah. Lha, siapa presiden tuan rumah ? Apalagi PD korupsi di proyek ini.
8. **Annas Faturrochman.** **Reshuffle itu memperlihatkan bahwa pemimpin nggak becus dan nggak pantas memimpin...** bukan rakyat yang menilai tapi mereka (pemimpin) itu sendiri yang memperlihatkan.. kalau memang mampu nggak bakalan ada reshuffle.. gitu aja kok repot...
9. **Dewa87.** Ah, reshuffle ato gak sama aja tuh, **menteri2 yg diganti adlh menteri2 yg hampir tdk terkena masalah.** Sedangkan, menteri2 yg terkena masalah, msh tetep dipertahankan. Apalagi **mengangkat Wamen,**

itu sama saja menambah beban APBN, walopun wamen itu setara dgn pejabat eselon 1, tp ttp aja menyedot APBN. SBY selalu cari aman, gak berani mengambil resiko besar. **Punya presiden militer diharapkan bisa tegas**, tapi ini malah sebaliknya, **lambat, banyak pertimbangan**, tapi **keputusannya gak tepat**. Ah, bosan sama pemerintahan SBY. 2014 msh lama yah??? Pgn cepet2 ganti presiden nihhh...

Analisis:

Publik memberikan respon negatif terhadap SBY dan kepemimpinannya. Publik menilai bahwa SBY seolah-olah meletakkan masalah penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, disebabkan kinerja menteri yang tidak maksimal. Buruknya kinerja itu digambarkan sebagai peran SBY yang lepas tangan dalam memimpin kabinetnya. SBY tidak memiliki visi, pengarahan, pemantauan dan evaluasi yang jelas terhadap menteri. Publik menilai bahwa kinerja pemerintahan SBY periode sebelumnya lebih baik karena peran wakil presiden (wapres) Jusuf Kalla, dinilai lebih aktif dibanding wapres Boediono.

Dalam pelaksanaan reshuffle, publik menilai bahwa presiden SBY lebih banyak menggunakan pertimbangan atas kepentingannya, dibanding dengan rakyat. Hal tersebut terlihat dari dengan mempertahankan menteri yang dianggap tidak mampu demi pencitraan politik pada parpol koalisi. Ini merupakan salah satu cara SBY untuk mempertahankan kekuatan di parlemen, karena parlemen memiliki kekuatan untuk melengserkan presiden jika menteri dari parpolnya dilengserkan. Publik menilai bahwa pelaksanaan reshuffle yang memakan waktu lama, merupakan cara SBY untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi yang banyak melibatkan kader partai Demokrat.

Publik sependapat dengan detikNews yang menyatakan bahwa SBY tidak berani mangambil resiko, sehingga mengangkat wakil menteri yang menyedot APBN negara. Publik menyayangkan latar belakang militer presiden SBY, namun tidak mampu bersikap tegas seperti kepribadian militer pada umumnya. Reshuffle yang dilakukan SBY dianggap sebagai cerminan kegagalan SBY dalam memilih, mengatur dan mengorganisasikan kinerja kabinetnya.

BAB 6

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Media online sebagai salah satu saluran dalam penyebaran informasi (*immediacy*) memiliki peranan yang cukup penting. Kecepatannya dalam menyebarkan informasi menjadi kelebihan media ini. Salah satu situs jurnalisme online yang diminati banyak pembaca karena kemudahan mengaksesnya adalah detikNews. Media ini berpegangan pada **ideologi pasar berbasis sosial**, yang selalu mengupdate pemberitaannya secara terus menerus serta mengedepankan isu sosial yang mendapat perhatian di masyarakat. Dengan kelebihan yang dimilikinya, maka media ini terus-menerus membombardir publik dengan segala pemberitaan. Dengan demikian, publik yang menjadi sasarannya akan terkena dampak dari pemberitaan tersebut.

Sejalan dengan fungsi media sebagai penyampai informasi kepada khalayak, maka media online dalam hal ini juga ikut memberitakan informasi sekaligus melakukan monitoring kinerja pemerintah yang dilaporkan dalam bentuk berita. Salah satu pemberitaan yang banyak dipublikasikan adalah tentang pemerintahan presiden SBY. Pemberitaan ini **tidak hanya menjadi agenda setting di media**, namun menjadi peristiwa yang mendapat perhatian publik. Kinerja pemerintahan SBY dinilai tidak maksimal sama seperti periode sebelumnya, karena atribut kepemimpinan yang dinilai tidak melekat dalam diri presiden. Proses perkembangan kualitas kepemimpinan SBY selalu dipantau oleh media, dimana kualitas kinerja yang tidak maksimal menimbulkan adanya penurunan popularitas presiden di kalangan masyarakat.

Penurunan popularitas tersebut tidak terjadi secara langsung, namun terlihat dari ketidaktegasan presiden SBY dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut tercermin dalam pembungkaman detikNews dalam pemberitaan reshuffle kabinet. Ketidaktegasan dalam manajemen pemerintahan tersebut menyebabkan adanya penurunan kualitas kerja yang banyak terlihat dan terungkap hingga ke publik. Beberapa kasus yang terjadi, menjadi pemicu penurunan popularitas SBY seperti terjadinya korupsi di pemerintahan (Kemenpora dan Kemenakertrans), dan ketidaktegasan SBY yang membuat menteri bekerja

seenaknya saja apalagi mereka yang merasa dilindungi parpol masing-masing, serta ketidakberanian SBY mengganti menteri yang tidak bekerja maksimal.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan kinerja pemerintahan yang buruk. Bahkan, kasus korupsi yang mendapat perlawanan dari presiden justru terjadi di pemerintahannya sendiri. Kasus **korupsi menjadi semacam budaya** yang dianut oleh setiap pejabat di pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pemerintahan SBY, kasus korupsi menjadi pokok persolan besar yang mengurangi kepercayaan publik terhadapnya. Bahkan, banyak pihak yang menyimpulkan bahwa kegaduhan reshuffle yang dilakukan oleh SBY juga bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kasus korupsi tersebut.

Jika mengacu pada konsep dilihat dari gaya kepemimpinan, maka disarankan SBY seyogianya **tidak menjalankan satu gaya kepemimpinan secara mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan**. Sebagai pemimpin, SBY sebaiknya memadukan dua gaya kepemimpinan dilihat dari sisi positif kedua tipe tersebut, seperti **otokratis yang menonjolkan sisi ketegasan, dan demokrasi yang tetap mendengar suara dari rakyat**. Kedua gaya kepemimpinan ini dapat didudukkan dalam suatu kontinum, yang memberikan model baru dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin.

Dengan gaya kepemimpinan semacam ini, maka ada saatnya presiden SBY membebaskan bawahannya dalam membuat keputusan, dan ada saatnya juga ketika presiden memiliki otoritas penuh dalam pembuatan keputusan. Bahkan, dengan gaya kepemimpinan ini, ada saatnya dimana pemimpin dan bawahan duduk bersama dalam membuat suatu keputusan. Jika dilihat dari pemingkai detiknews atas banyaknya kasus yang terjadi di pemerintahan, maka sisi ketegasan SBY sama sekali tidak terlihat, meskipun SBY berasal dari latar belakang militer.

Dalam hal ini, detikNews memperlihatkan ketidakprofesionalan presiden SBY dalam perannya sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kepemimpinan yang diperankan presiden SBY dalam hal ini, berlatar pada **kepemimpinan *transactional leadership* yang hanya mengarah pada keuntungan politis presiden dan menteri asal parpol**. Presiden dan para bawahannya, tidak memiliki motivasi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, kepemimpinan ini dinilai

tidak tepat. Tindakan SBY yang menyesal memberikan kepercayaan penuh pada kabinet yang dipimpinnya, menunjukkan adanya pelimpahan kesalahan kepada menteri atas buruknya kinerja pemerintahan.

Tindakan tersebut menjadi cerminan ketidakberhasilan SBY sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Kepercayaan penuh dalam hal ini, dimaknai sebagai karakter kepemimpinan SBY dengan pendekatan *laissez faire dimana otoritas penuh ada ditangan para menteri*. Otoritas pemimpin hanya sedikit, karena para bawahannya telah diberikan kepercayaan penuh untuk membuat suatu keputusan. Kemungkinan tidak adanya pengawasan berkelanjutan dari SBY, menjadi penyebab tidak maksimalnya kinerja para bawahannya tersebut. Pendekatan model kepemimpinan ini kerap kali tidak memberikan hasil yang maksimal, karena kekurangpahaman para menteri dalam membuat keputusan, tercermin dari beberapa keputusan menteri yang malah menimbulkan masalah baru di tanah air.

Dari hasil pembeding detikNews, penulis menemukan bahwa media online **hanya menjalankan fungsi *guard dog* (anjing penjaga)**. Pemberitaan pada media ini dinilai cukup kritis dalam menanggapi dan memberitakan peristiwa tentang elit politik, dalam hal ini presiden SBY yang dinilai melanggar suatu nilai yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari kasus yang diberitakan oleh media berbanding lurus dengan terjadinya penurunan popularitas SBY. Dilain sisi, media memberitakan peristiwa ini hanya karena nilai jualnya yang cukup tinggi terkait aktor yang diberitakan didalamnya. Media online juga akan ikut mendukung suatu lembaga atau organisasi yang diterima masyarakat luas, karena sifatnya yang berdasar pada ideologi pasar berbasis sosial. Seringkali media hanya memikirkan untung tanpa adanya spirit perlawanan terhadap kaum penguasa.

Presiden sebagai seorang kepala negara memang identik dengan popularitas. Dalam hal ini **popularitas seharusnya identik dengan kualitas kepemimpinan**, dalam wujud hasil kinerja yang betul-betul dirasakan masyarakat. Namun dari hasil pembeding detikNews, popularitas presiden SBY sebagai pemimpin negara identik dengan kegiatan yang tidak penting, bahkan berdampak pada semakin menurunnya kualitasnya di mata publik.

detikNews membingkai SBY sebagai pemimpin yang masih menonjolkan pencitraan politik dan popularitasnya dihadapan khalayak. Ini menunjukkan kepemimpinan SBY yang lemah, sebab pada dasarnya popularitas bukanlah segalanya bagi seorang pemimpin. SBY bekerja untuk rakyat bukan untuk mengejar popularitas. Jika presiden SBY tampil maksimal dalam kinerja kepemimpinannya, maka popularitas lah yang akan mengējarnya. Selain itu, presiden SBY juga tidak lagi membutuhkan kepopuleran, karena periode ini menjadi jabatan terakhirnya duduk di kursi kepresidenan.

Dari hasil pembedingkaian, penulis mendapatkan hasil bahwa budaya Jawa yang melekat pada sosok SBY, justru menjadi salah satu pemicu menurunnya kualitas kepemimpinannya. Karakternya yang sangat memperhatikan perasaan kolega dan elit politik lainnya, mencerminkan adanya ketidaktegasan sebagai seorang pemimpin. Disisi lain, ketergantungan faktor interdependensi SBY dengan partai koalisi, menjadi salah satu faktor yang ikut menurunkan popularitasnya, dimana pengambilan keputusan SBY seringkali hanya menguntungkan parpol itu sendiri, bukan rakyat. Di dalam teks disebutkan bahwa untuk mencopot satu menteri saja, presiden harus berkonsultasi kepada berbagai pihak, terutama ketua parpol koalisi, yang menunjukkan ketidakmampuan SBY untuk lepas dari kungkungan parpol.

Dalam pelaksanaan reshuffle kabinet pun, SBY masih tetap mempertimbangkan perasaan para elite politik. Kata reshuffle seyogianya menggambarkan sesuatu yang bagus, untuk merombak kabinet ke wajah yang baru. Namun, **reshuffle yang dilakukan SBY hanya bersifat kosmetik dan setengah hati**. Bukannya melakukan perombakan atas menteri yang tidak bekerja maksimal, justru menambah wakil menteri di kementerian bermasalah. Dapat dikatakan, bahwa reshuffle yang dilakukan oleh SBY hanyalah bahasa politik sebagai pengemasan atas kinerja pemerintahannya yang tidak maksimal. Dengan berbagai alasan, SBY mengangkat sejumlah wakil menteri dengan alasan tertentu hanya untuk kepentingan sepihak

Perombakan kabinet yang dilakukan oleh presiden semata-mata hanya untuk mengakomodir kaum professional yang tidak berasal dari partai politik. Kaum professional tersebut dibutuhkan untuk menunjang kinerja kabinet yang

selama ini tidak maksimal. Pengangkatan wakil menteri tersebut terkesan hanya sebagai akomodasi untuk memperbanyak kawan, dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya.

Selain itu, pengangkatan wakil menteri tersebut terlihat jelas bukan karena kebutuhan, tetapi karena tidak yakin akan kemampuan menterinya. Keberadaan wakil menteri tersebut, disebabkan karena ketidakberanian melengserkan menteri asal parpol yang bermasalah, akibat tersandera politik pencitraan. Presiden SBY akan tetap merasa aman, jika menterinya tidak sepaham dan tidak mampu bekerja dengan baik karena masih ada wakil menteri yang dapat dikendalikan.

Dari keseluruhan hasil pembedingkaian detikNews sebagai komunikator dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa salah satu kekuatan dari media online dalam memberitakan penurunan popularitas presiden SBY dibanding dengan media konvensional adalah dimungkinkannya respon publik yang hadir secara langsung. Respon publik yang menonjol atas pemberitaan tersebut adalah adanya kesamaan pendapat media dan publik bahwa SBY merupakan pemimpin yang tidak tegas.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan diskusi tentang pemingkai detikNews dalam pemberitaan tentang reshuffle kabinet, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemingkai terlihat bahwa media memiliki peran dalam mengontrol kinerja pemerintah, dan memberitakannya pada publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemerintah sebagai objek, media sebagai saluran dan masyarakat sebagai khalayak komunikasi massa.
2. Dari hasil analisis pemingkai media terhadap pemberitaan reshuffle kabinet, digambarkan bahwa gaya kepemimpinan SBY dipengaruhi oleh karakter budaya yang melekat padanya. Hal ini tercermin dari cara presiden SBY yang tidak bisa lepas dari kungkungan koalisi dalam pengambilan keputusan, sebagai cerminan dari masyarakat yang menganut sistem kolektivitas.
3. Pemberitaan media yang terus-menerus tentang kinerja pemerintahan SBY, memberikan peluang yang besar bagi terbentuknya opini publik tentang kepemimpinan SBY tersebut. Pemberitaan tersebut tidak hanya sebatas agenda media, namun menjadi agenda publik juga.
4. Secara akumulatif, apa yang ditingkai oleh detikNews merupakan realisasi dari peran media tersebut sebagai *guard dog* (anjing penjaga).

7.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Akademik

Penelitian ini terkait pada framing media tentang kepemimpinan SBY. Teori, konsep dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penurunan popularitas SBY yang secara implisit tercermin dalam teks berita tentang reshuffle kabinet.

2. Implikasi Praktis

Penggunaan model analisis framing Robert N. Entman, secara sistematis mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya popularitas presiden SBY.

7.3 Rekomendasi Penelitian

1. Rekomendasi Akademik

Selain menggunakan teori dan konsep kepemimpinan, penelitian lain dengan unit penelitian yang sama dapat menggunakan teori dan konsep tentang konflik dan komunikasi politik. Untuk metode analisis, dapat menggunakan model analisis framing lainnya.

2. Rekomendasi Praktis

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar media seyogianya bersifat lebih kritis terhadap pemerintah. Karena dalam suatu negara demokratis, peran media sebagai *watch dog* sangat diperlukan dalam mengawasi kinerja pemerintah, dan media tetap berpihak pada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, M. Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Arifin, Anwar, Prof.Dr. 2011. *Komunikasi Politik; Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik*. Depok: Gramata Publishing.
- Burns, James. 1978. *Leadership*. New York: Harper & Row Publisher.
- Craig, Richard. 2005. *Online Journalism; Reporting, Writing and Editing for New Media*. USA: Thomson Wadsworth.
- Effendi, Onong Uchjana Effendi. 1992. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Hall, Jim. 2001. *Online Journalism: A Critical Primer*. London: Pluto Press.
- Hall, Jim. 2005. *Online Journalism: Principles and Practices of News for The Web*. London: Halcomb Hathaway Publisher.
- Harari, Oren. 2003. *The leadership Secrets of Colin Powell, Sebuah Paradigma Baru Kepemimpinan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Irawan, Prasetya, Dr, M.Sc. 2007. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan Kedua. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*. Edisi 2 Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik; Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Lesmana, Tjipta. 2009. *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mannheim. 1991. *Ideology dan Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Outledge.
- McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory. Second Edition*. Penerjemah: Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua Puluh Satu. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik (Pendekatan Teori dan Praktik)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghaka Indonesia.
- Neuman, William Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Pearson Education.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*. Edisi ke-6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, Frans Surdiasis. 1999. *Politik media Mengemas Berita*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Oetama, Jakob. 2004. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation methods*, 3rd edition. Thousand Oaks California: Sage Publication.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge. 2007. *Organizational Behavior*, 12th ed. Penerjemah : Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.
- Roskos-Ewoldsen, David R, Beverly Roskos-Ewoldsen. 2002. *Current Research In Media Priming dalam Chapter 6 The Sage handbook of Media Processes and Effects*. California: Sage Publication.
- Ruben, Brent D, Lea P. Stewart. 2006. *Communication and Human Behavior* 5th edition. USA: Pearson Education.

- Ruskhan, Abdul Gafar. 2007. KOMPAS Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Salim, Agus. 2006. Teori & Paradigma; Penelitian Sosial. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Santana K, Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shah, Dhavan V, Douglas M. McLeod, Melissa R. Gotlieb, dan Nam-Jin Lee. 2002. Framing and Agenda Setting, dalam Chapter 6 The Sage handbook of Media Processes and Effects. California: Sage Publication.
- Shoemaker, Pamela J, Stephen D. Rees. 1996. Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content. Second Edition. USA: Longman Publishers.
- Steven J, Kirsh. 2006. Children, Adolescents, and Media Violence; A critical Look at the Research. California: Sage Publication.
- Sudibyo, Agus. 2009. Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Tasmara, K.H. Toto Tasmara. 2006. Spritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spritual). Jakarta: Gema Insani Press.
- West, Richard, Lynn H. Turner. 2007. Introducing Communication Theory: Analysis and Application, 3rd ed. Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Internet

- Ardhi, Yogi. Menurunnya Popularitas SBY Harus Jadi Momentum. 18 Mei 2011. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/05/18/lldmrj-menurunnya-popularitas-sby-harus-jadi-momentum> (diunduh 9 Januari 2012, 12:48 WIB).
- Bilcyber.com. Sejarah Website DETIK.com. <http://bilcyber.com/2011/05/sejarah-website-detik-com/> (diunduh 25 Oktober 2011, 12:56 WIB).

detik.com. Redaksi detik.com Digital Life. <http://dapur.detik.com/content/redaksi>. (diunduh 25 Oktober 2011, 12:02 WIB).

detikNews. Gerindra Nilai Menteri Pilihan SBY Tak Jelas Prestasinya, 21 Oktober 2011, <http://www.detiknews.com/read/2011/10/21/031136/1749141/10/gerindra-nilai-menteri-pilihan-sby-tak-jelas-prestasinya> (diunduh, 21 Oktober 2011, 13:33 WIB).

Gunawan, Deden. Reshuffle, Siapa Bermasalah? Sang Menteri, dari Korupsi hingga Selingkuh. *detikNews* edisi 29 September 2011, 08:45 WIB. http://www.detiknews.com/read/2011/09/29/084544/1732_857/159/sang-menteri-dari-korupsi-hingga-selingkuh. (diunduh 18 Oktober 2011, 15:06 WIB).

Gunawan, Deden. Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY? Tak Ada Harapan dari Paradox Presiden, *detikNews* edisi 24 Oktober 2011, 11:56 WIB. <http://www.detiknews.com/read/2011/10/24/115630/1750891/159/tak-ada-harapan-dari-paradoks-presiden>, (diunduh 5 November 2011, 16:08 WIB).

Indarini, Nurvita. Proses reshuffle Terlalu Panjang Bak Sinetron. *detikNews* edisi 13 Oktober 2011, 18:59 WIB, <http://www.detiknews.com/comment/2011/10/13/185923/1743687/10/proses-reshuffle-terlalu-panjang-bak-sinetron>, (diunduh 9 Desember 2011, 20:19 WIB).

Indarini, Nurvita. Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY. *detikNews* edisi 18 Oktober 2011, 11:49 WIB, <http://us.detiknews.com/read/2011/10/18/114902/1746532/10/politik-pencitraan-kompromi-ramuan-stabilitas-pemerintahan-sby>, (diunduh 30 Oktober 2011, 13:45 WIB).

Kusumadewi ,Anggi & Syahrul Ansyari. Survei : Kepuasan Publik pada SBY Menurun. *Vivanews.com* edisi 23 Oktober 2011, 15:16 WIB. <http://us.politik.vivanews.com/news/read/258043-survei--publik-makin-tak-puas-pemerintah-sby> (diunduh 9 Januari 2012, 16:04 WIB).

Kusumadewi, Anggi & Syahrul Ansyari. Kepuasan pada SBY Turun, Demokrat Tak Cemas. *Vivanews.com* edisi 24 Oktober 2011, 07:01 WIB. <http://us.politik.vivanews.com/news/read/258076-kepuasan-pada-sby-turun--demokrat-tak-cemas> (diunduh 9 Januari 2012, 15:52 WIB).

Media On Line. Sejarah dan Perkembangan detik.com. Post 3 Oktober 2011. <http://mediaol-irdasukarini.blogspot.com/2011/10/sejarah-dan-perkembangan-detikcom.html>. (diunduh 25 Oktober 2011, 13:52 WIB).

Saputra, Ari. Akibat 8 Kementrian, Kepercayaan Publik Pada SBY Tinggal 37,7%. *detikNews* edisi 29 September 2011, 15:29 WIB. <http://www.detiknews.com/read/2011/09/18/152910/1724975/10/akibat-8-kementerian-kepercayaan-publik-pada-sby-tinggal-377>, (diunduh 18 Oktober 2011, 16:00 WIB).

Saputra, Ari . LSI: Gaya Kepemimpinan Boediono Turunkan Popularits SBY. *detikNews* edisi 16 Oktober 2011, 23:18 WIB. <http://www.detikNews.com/read/2011/10/16/231834/1745253/10/lsi-gaya-kepemimpinan-boediono-turunkan-popularitas-sby>, (diunduh 18 Oktober 2011, 15:55 WIB).

Tamba, Arie MP. Jurnal Nasional edisi Rabu, 28 Sep 2011, *Reshuffle*, <http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-09-28/183570> (diunduh pada 17 November 2011, pukul 11:58 WIB).

Taufiqurahman, Muhammad, Deden Gunawan. *Reshuffle*, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah. *detikNews* edisi 29 September 2011, 12:36 WIB. <http://www.detiknews.com/read/2011/09/29/123625/1733112/159/tak-berubah-presiden-yang-bermasalah> (diunduh 9 Desember 2011, pukul 20:21 WIB).

Tentang LSI, <http://www.lsi.or.id/profil/1/profil-lsi>, (diunduh 9 Januari 2012, 13:38 WIB).

Jurnal

Tannenbaum, Robert, Warren H. Schmidt. 1958. How to Choose a Leadership Pattern. *Harvard Business Review*, 36, March-April.

Hayon, Y.P. 2005. Aspek Logis dalam Pernyataan-pernyataan Politik dalam Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah, *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* Vol.7 No.2 Oktober 2005.



LAMPIRAN

Artikel dan Respon Publik

Berita 1

Kamis, 29 September 2011 (08:45 WIB)

Reshuffle, Siapa Bermasalah?

Sang Menteri, dari Korupsi Hingga Selingkuh

Deden Gunawan-*detikNews*

Reshuffle merupakan sebuah keharusan karena separuh kabinet SBY berkinerja parah. Tapi seriuskah Presiden SBY melakukan reshuffle? Kalau serius, itu artinya SBY harus mengganti separuh dari menterinya.

Evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menemukan 17 dari 34 menteri atau 50 persen menteri berkinerja buruk. 17 Menteri mendapat rapor merah karena memiliki kinerja buruk yang berimbas pada tidak jalannya roda pemerintahan.

"Iya separuhlah (di-reshuffle). Supaya betul-betul ada refreshing, membuat harapan baru," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution.

Siapa 17 menteri dari 34 menteri yang berkinerja buruk, Ketua UKP4 Kuntoro Mangunsubroto tidak mau membuka siapa 17 menteri yang berkinerja buruk itu. Tapi Lembaga Survei Indonesia (LSI) setidaknya mendapatkan 10 kementerian bermasalah yang layak dicopot. 10 Kementerian itu menyebabkan melorotnya kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY.

Ada 4 kategori menteri bermasalah. Pertama menteri yang tersangkut masalah dugaan korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. "Isu korupsi kementerian memberikan daya rusak paling besar bagi kabinet," kata peneliti LSI Adjie Alfarabi.

Kedua, menteri yang bermasalah dengan kebijakan negatif yang dikeluarkannya. Nama Muhaimin kembali muncul dalam daftar ini. Ia dinilai lemah dalam perlindungan TKI. Kasus dipancungnya tenaga kerja wanita Ruyati di Arab Saudi menjadi contoh.

Lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, memiliki kebijakan negatif karena pernah memberi remisi pada koruptor. Menteri Agama Suryadharma Ali, yang tidak mampu melindungi warga minoritas dalam kasus Ahmadiyah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Darwin Z Saleh bermasalah dengan kasus tabung gas yang masih terjadi saat ini. Juga Menteri Pertanian Suswono yang sulit merealisasikan harga bahan pokok yang terjangkau.

Ketiga menteri yang memiliki 'cacat moral'. LSI mencatat ada tiga menteri, yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh, yang diduga memiliki masalah keluarga dengan munculnya tuduhan selingkuh dengan wanita lain.

"Jika komitmen dengan istri saja dilanggar, bagaimana komitmen dengan rakyat yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan menteri?" kritik Adjie.

Keempat, menteri yang memiliki masalah kesehatan yakni Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang diisukan terkena kanker paru-paru dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang masuk rumah sakit karena diduga sakit jantung.

Dari 10 menteri bermasalah itu, sumber Istana mengungkap hanya 4 menteri yang bakal dicopot. Sementara 4 menteri lainnya akan digeser dan satu menteri masih dalam pertimbangan.

Mereka yang bakal dicopot, menurut sumber adalah Meneg BUMN Mustofa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menhub Freddy Numberi disebut-sebut bakal diresuffle. Sementara menteri yang akan dirotasi adalah Muhaimin, Tifatul Sembiring serta Andi Mallarangeng.

Bila kemudian ternyata pisau reshuffle hanya mengenai sedikit menteri, maka perombakan SBY pun dipertanyakan. Akan muncul anggapan ia hanya bersifat komestik. Apalagi Muhaimin dan Andi yang paling merusak popularitas SBY hanya digeser posisinya.

"Kalau hanya sebagai kosmetik, mungkin cuman dua menteri yang diganti hanya karena ketidakpuasan kinerja pemerintahan SBY semakin menguat," kata pengamat politik Yudi Latief.

Reshuffle pun sebenarnya belum cukup. Selain melakukan reshuffle seharusnya Presiden SBY juga mengungkapkan apa alasan pergantian menteri tersebut. Apa karena masalah kinerja atau masalah lainnya.

"Presiden kan pegang data dari UKP4 tentang rapor para menterinya. Data itu harusnya juga diungkapkan ke publik. Supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat," jelas Pengamat politik dari Indobarometer Mohammad Qodari kepada detik+.

Dalam laporan UKP4 sangat jelas capaian-capaian apa yang telah dilakukan para menterinya. Juga target-target yang belum diselesaikan. Dengan informasi ini masyarakat jadi tahu kalau kinerja menterinya yang kurang bagus. Jangan sampai masyarakat malah menganggap SBY yang tidak mampu mengelola kabinet yang dipimpinnya.

Nilai positif lainnya, dengan dibukanya alasan pergantian menteri, penggantinya akan tahu poin-poin mana saja yang sudah tercapai atau pun belum. "Penilaian itu bisa dijadikan pegangan bagi menteri yang baru dilantik sehingga mereka tahu apa saja yang belum tercapai menteri sebelumnya," ujarnya.

Sementara soal komposisi keterwakilan parpol pendukung koalisi, Qodari memperkirakan, tidak akan berubah. Sebab komposisi keterwakilan parpol pendukung akan jadi pertimbangan SBY. Yang berubah hanya orang-orangnya saja.

Nah, soal komposisi keterwakilan parpol ini sempat menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai, kalau SBY tetap mempertahankan komposisi keterwakilan parpol sama saja SBY melakukan reshuffle setengah hati. Sebab yang jadi pertimbangan bukan kinerja.

"SBY akan main aman. Caranya dengan menggeser beberapa pos menteri dan tukar menteri yang tidak perform dengan kader partai yang sama," ujar pengamat komunikasi politik Charta Politika Indonesia Arya Fernandes.

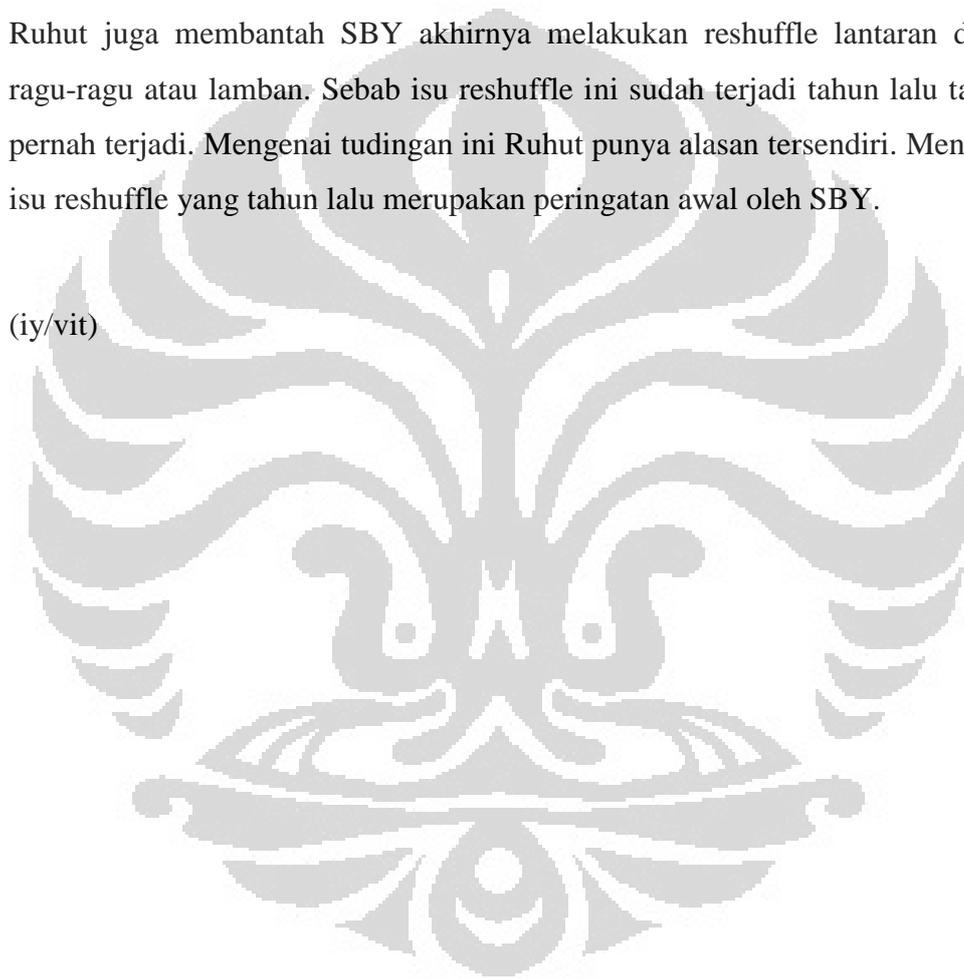
Supaya bisa bermain aman, kata Arya, SBY akan menggunakan data-data dan menerima masukan dari UKP4. Dengan cara ini yang terjadi persaingan atau sikut-sikutan di internal partai koalisi. Mereka akan bersaing untuk menjadi

menteri. Sementara hubungan SBY dengan parpol-parpol koalisi tidak terpengaruh.

Tapi kata politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, komposisi keterwakilan parpol bukan jadi pertimbangan SBY. Sebab SBY setahun lalu sudah memberi peringatan untuk menteri-menterinya, termasuk yang berasal dari parpol koalisi. "Bapak SBY tidak terpengaruh dengan jatah-jatah itu. Semua berdasarkan kepada kinerja," kata Ruhut kepada detik+.

Ruhut juga membantah SBY akhirnya melakukan reshuffle lantaran dianggap ragu-ragu atau lamban. Sebab isu reshuffle ini sudah terjadi tahun lalu tapi tidak pernah terjadi. Mengenai tuduhan ini Ruhut punya alasan tersendiri. Menurutnya, isu reshuffle yang tahun lalu merupakan peringatan awal oleh SBY.

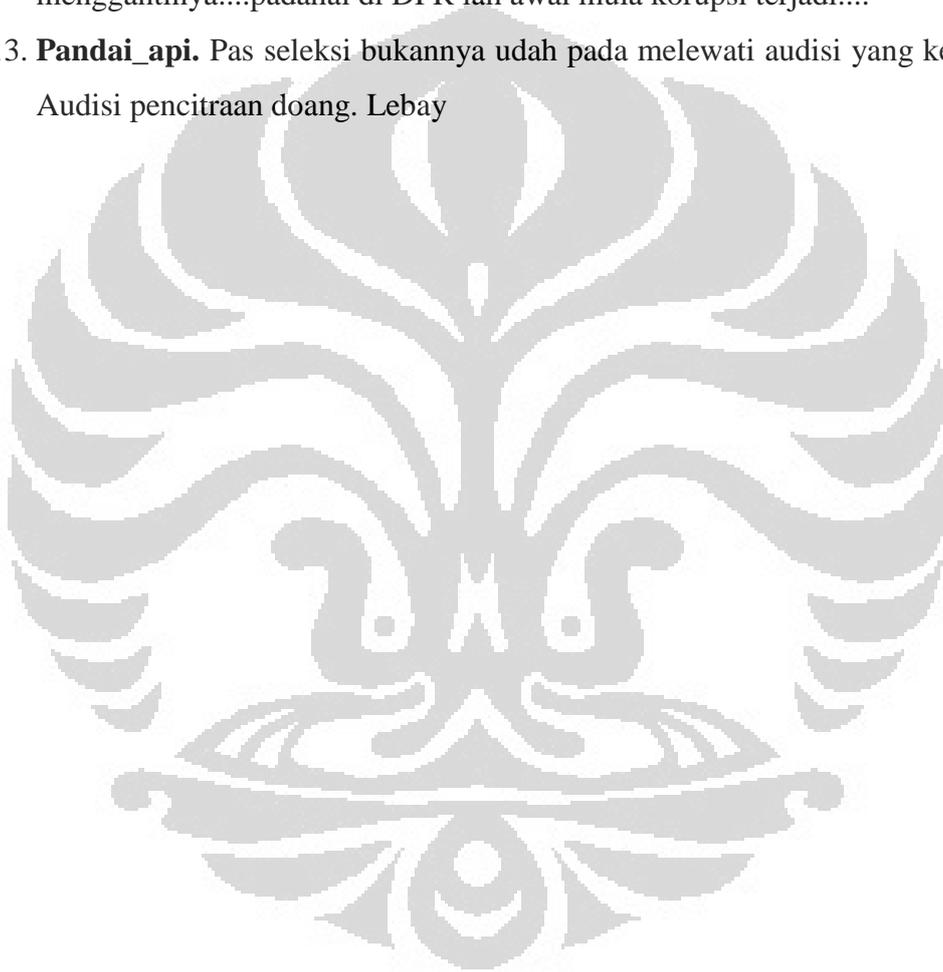
(iy/vit)



RESPON PUBLIK

1. **Asrul Pranto Putra Rambe.** Kalau saya yg salah presidennya..krn sebagai pemimpin yg baik harus tegas..negara ini bukan sinetron....akui kesalahan ente bos....pemimpin yg baik salah satunya mengaku salah jika memang salah..jgn tuduh org lain...
2. **Lantaknyotu.** Menteri yang ter indikasi korupsi wajib diganti!!!!!!
3. **Andhika Love Peace.** Sbnrnya gak perlu reshuffle ASAL dari Presiden n semua pejabat dari pusat hingga daerah kemaluan (desa tertinggal n termiskin) komitmen dg SUMPAH n JANJI JABATANnya alias TOTAL utk rakyat bukan utk diri sendiri partai n golongan
4. **Rifki Ferdiansyah Nasution.** Inilah pentingnya ada lembaga yang mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja Menteri, jika tak sesuai maka perlu ada Reshuffle
5. **A Priyono Soerojo.** Mentri perhubungan selingkuh akibatnya banyak terjadi kecelakaan, alat transportasi macam apapun jadi gak aman. mentri perumahan wah harga rumah naaaiiiiikkkkkk terus,trus kalo mentri ESDM..?
6. **CYPRI.** Sampai kapan SBY mempertahankan mentri-mentri yg sdh tdk mampu,kalau sekedar digeserpun adalah hanya menyenangkan Partai koalisi tetapi rakyat di korbankan.
7. **Alex Tampubolon.** Saya sangat setuju adanya reshuffle, semoga reshuffle ke depan bisa memberikan pemerintahan yang lebih optimal dan lebih baik.
8. **Almira.rahman.** Rezim ini secara moral dan etika sebenarnya sudah tidak layak lagi memimpin rakyat indonesia....korupsi, selingkuh, berbohong, berdusta, zalim, lamban, peragu, senang bersandiwara dan moral2 buruk lainnya lengkap dimiliki rezim ini! jika rezim ini diakhiri lewat pemilu dipercepat, saya hakul yakin rakyat akan senang karena itu artinya anggota2 dpr juga harus merayu rakyat lagi agar bisa terpilih, jadi bersih2 anggota dpr juga! pemerintahan baru, anggota dpr baru, pemimpin kpk baru, semuanya serba baru 🤔
9. **Putra Paris Van Java.** Memang dari dulu ngga ada yang bener tuh kerja para mentri..

10. **Badthegonk Beangkeyrock Baong.** Mentri mentri koplak kerjanya tidur pengen di bayar pula,mending byar pelcur aja jelas kerasa kerjanya.
11. **Soepono Pono.** Menteri yang korupsi bukan hanya dipecat, seharusnya dihukum sesuai sumpahnya pakai kitab suci, didalamnya berisi mencuri potong tangan (Al\Quran).
12. **Ahmad Poniman.** Menteri2 yg bermasalah selalu didesak agar diganti....tp kalau anggota DPR bermasalah....gk ada seorangpun yg berani teriak tuk menggantinya....padahal di DPR lah awal mula korupsi terjadi....
13. **Pandai_api.** Pas seleksi bukannya udah pada melewati audisi yang ketat tuh? Audisi pencitraan doang. Lebay



Berita 2

Kamis, 29/09/2011 12:36 WIB

Reshuffle, Siapa Bermasalah?

Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah

Muhammad Taufiqqurahman, Deden Gunawan – **detikNews**

Reshuffle kabinet tidak berarti penting bagi jalannya pemerintahan hingga 2014, jika Presiden SBY justru tidak mengubah atau mengoreksi diri. Sorotan atas reshuffle tidak hanya pada menteri yang bermasalah tapi juga mengarah pada presiden.

Istana meyakinkan reshuffle dilakukan untuk memperbaiki kinerja menteri yang payah. Istana mengakui selama ini banyak menteri yang kewalahan dalam melaksanakan program-program kerjanya. Buruknya lagi sikap menteri ini menular pada bawahannya, dari level eselon I, II, dan III yang ikut-ikutan tidak bekerja secara efektif.

"Sebagian besar malah ignorance terhadap kewajibannya," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga.

Namun kalau mau fair, buruknya kinerja menteri juga tidak bisa dilepaskan dari atasannya, yakni Presiden SBY. Para menteri sebagai pembantu hanya menjalankan instruksi presiden. Sikap SBY yang tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahan mengakibatkan para menteri bekerja seenaknya saja. Apalagi mereka merasa dilindungi parpol masing-masing sebagai bagian dari koalisi.

"Persoalannya bukan di menteri tapi di SBY sebagai seorang pemimpin," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan.

Pernyataan Istana bahwa reshuffle untuk memperbaiki kinerja kabinet pun diragukan sejumlah kalangan. Pengamat politik Yudi Latief mencurigai reshuffle dilakukan hanya untuk memperbaiki citra SBY. Apalagi bila kemudian reshuffle hanya dilakukan terhadap sedikit menteri.

"Kalau hanya sebagai kosmetik, mungkin cuman dua menteri yang diganti hanya karena ketidakpuasan kinerja pemerintahan SBY semakin menguat," kata Yudi.

Yudi menyebut tindakan reshuffle yang dilakukan oleh SBY terlambat. Waktu yang tersisa dari masa pemerintahan SBY dalam perhitungan politik, cuma setahun, dengan alasan pada tahun 2012 mendatang, partai-partai politik telah mengambil ancang-ancang untuk kembali siap bertarung pada pemilu dan pilpres 2014. "Menteri akan kembali menjadi fundraising dari parpol," ujarnya.

Jika pun dilakukan reshuffle, maka Yudi menyebut lebih dari lima puluh persen pos kementerian layak untuk diganti. Yudi malah menyarankan SBY untuk mengambil pembantunya dari kalangan profesional, namun lagi-lagi Yudi meragukan SBY akan mengambil langkah untuk mengambil kalangan profesional.

"Kalau non partai, SBY tidak akan berani karena unsur dalam pemerintahan dan partainya banyak masalah," terangnya.

Yudi menjelaskan, reshuffle yang dilakukan oleh SBY tidak benar-benar menjanjikan hal yang substantif dalam perubahan kinerja pemerintah. Baginya, reshuffle yang dilakukan hanya untuk memuaskan aspirasi dari kekuasaan saja.

"Yang jelas, kalau ternyata setelah diganti tidak ada perubahan, maka kalau itu Presiden dan Wapresnya yang bermasalah," ujar Yudi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti sependapat dengan Yudi soal perlunya menteri profesional. Menurutnya, bila memang SBY bisa tegas dan punya keberanian, seharusnya dalam mengelola pemerintahan selama 2,5 tahun ke depan, SBY berani mengganti kabinet sekarang dengan orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. SBY harus keluar dari sekat-sekat kepentingan partai.

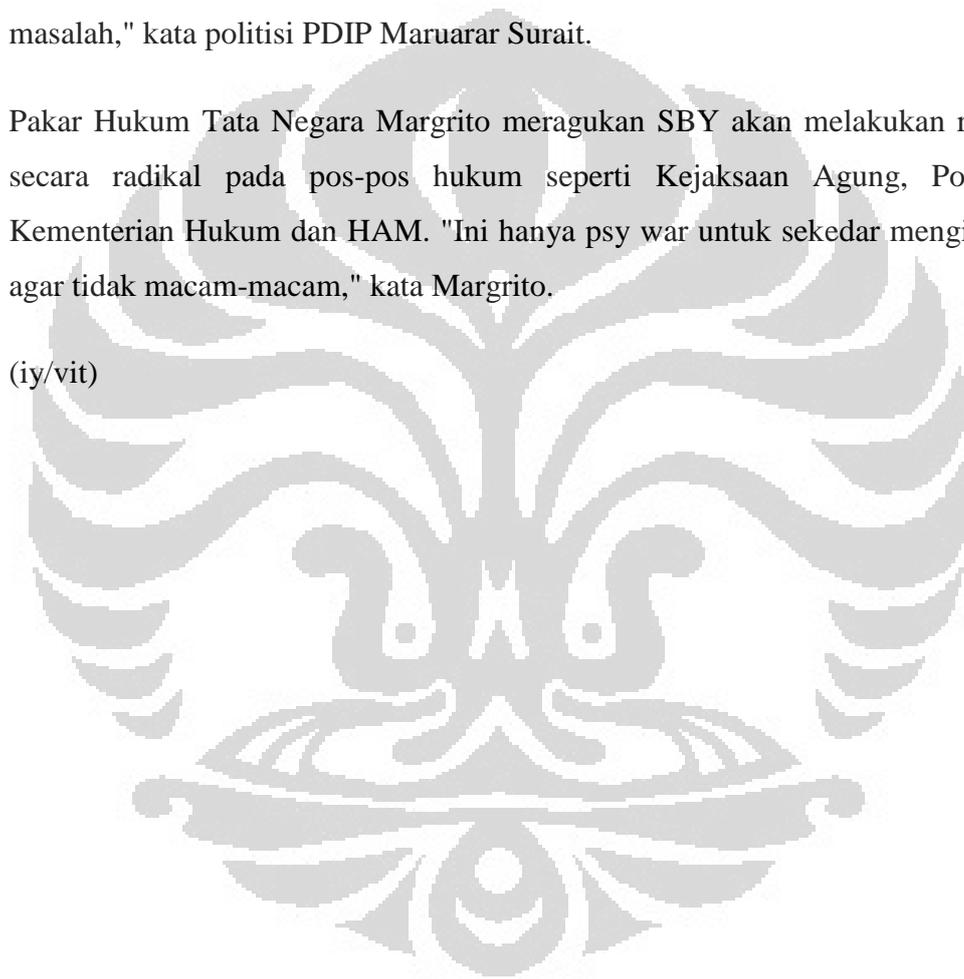
"Itu pun kalau target dia ingin dikenang publik. Karena saya yakin banyak orang yang seperti itu tersedia di Indonesia," kata Ray.

Tapi jika SBY hanya ingin bermain aman saja, kinerja pemerintahan SBY ke depan tidak akan berubah. karena hanya mementingkan kepentingan politik saja. Bukan performa kabinet untuk menjalankan program pemerintahan yang jadi tujuan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyarankan SBY melakukan reshuffle secara radikal khususnya pada pos kementerian yang membawahi hukum dan ekonomi. "Yang paling penting kriteria orang yang mampu menyelesaikan masalah, jangan hanya melaporkan dan menambah masalah," kata politisi PDIP Maruarar Surait.

Pakar Hukum Tata Negara Margrito meragukan SBY akan melakukan reshuffle secara radikal pada pos-pos hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM. "Ini hanya psy war untuk sekedar mengingatkan agar tidak macam-macam," kata Margrito.

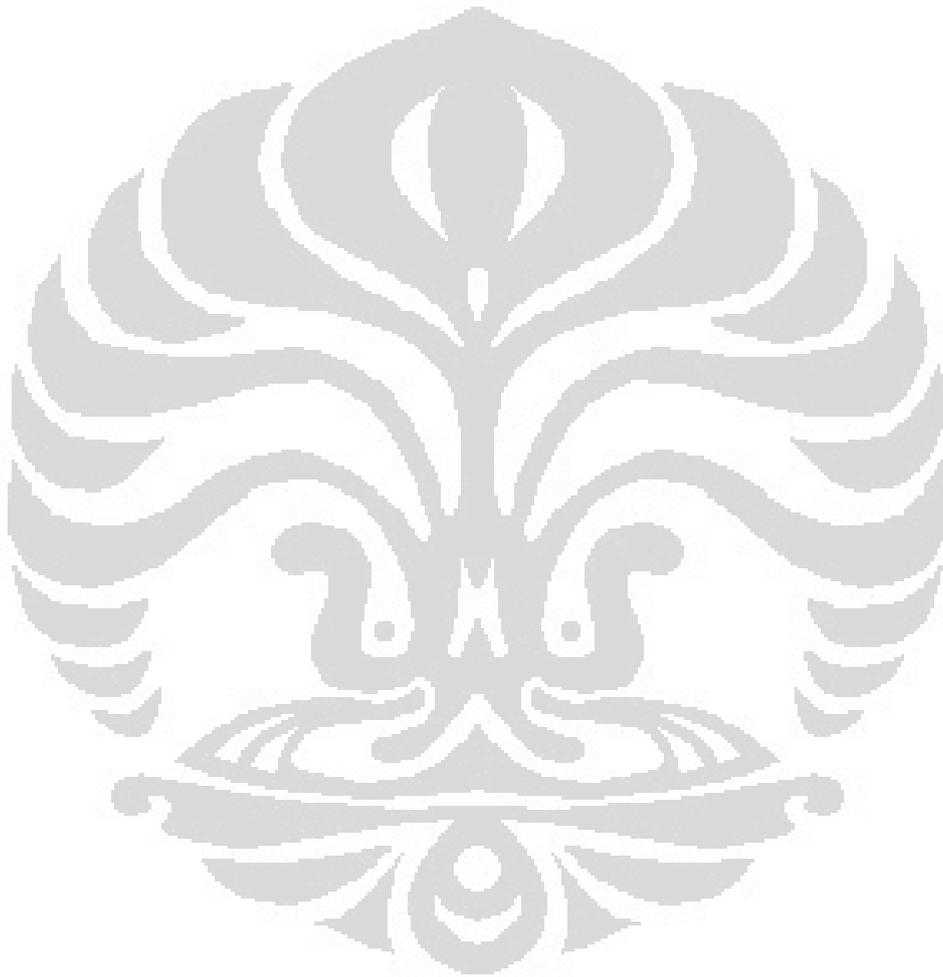
(iy/vit)



RESPON PUBLIK

1. **Elpadrino Solitario.** Pengamat2 ini msh ngayal aja. sdh tahu sby kayak gitu masih mengharapkan yg mustahil....hahahahhahah negeri para penghayal
2. **Rifki Ferdiansyah Nasution.** Melihat Kinerja beberapa Menteri-menteri saat ini, Topik Reshuffle sudah sangat tepat, jangan berlama-lama, agar program2 posistif bisa segera dijalankan
3. **Wahyu Setiawan.** Kata siapa SBY bisa bertahan sampai 2014 ?
4. **Sappoe hans.** Merenopasi kib ii, keputusannya di jenderal , lanjut or sebagai orang indonesia dengan status anggota dpr-ri, dari non terdaftar di kelembagaan legislatif alias rakyat tapi pemegang hak kedaulatan di ri ini, tentu ada hak-hak untuk bersuara terkait urusan negara kita ini, yang memang sebagai pemilik saham terbesar di ri. Apapun alasannya publik yang lebih banyak mengetahui ttg jalannya pemerintahan dari time to time. Kib ii, dengan nilai pas-pasan di mata publik karena memang soal -soal yang harus dikinerjakan sekaligus meresponnya tidaklah mudah untuk di laksanakan. Sementara pelaksana jalannya pemerintahan yang dimenej oleh kelembagaan setingkat lembaga.
5. **Juan.** Salah satunya Kekuasaan Presiden Yang Mandiri dalam UUD 1945 adalah masalah reshuffle. Evaluasi sudah dilakukan, tinggal tunggu saja siapa yang akan diganti. Bila anda menginginkan perubahan lebih baik maka dukunglah reshuffle, karena ini bagian dari proses untuk perubahan itu.
6. **Jobagor.** Lebih tepat sby yang diganti karena masalahnya memang pada dia.....
7. **Bantan Wacono.** Sudah tak kompeten..
8. **Arifin Wae.** Jangan cuman di bedakin... pakein ondok juga....
9. **Kempong.com.** Memang sudah seharusnya yang diganti itu silebay lemot.. otaknya banyak pertimbangan kearah pribadi sendiri , bukan untuk kepentingan rakyat, urusan rakyat nomor sekian yang penting langgeng 5 tahun adapun hasilnya nol, bodoh amat.. ya bey..lebay
10. **Wahyu Setiawan.** Kata siapa SBY bisa bertahan sampai 2014 ?

11. **Rifki Ferdiansyah Nasution.** Melihat Kinerja beberapa Menteri-menteri saat ini, Topik Reshuffle sudah sangat tepat, jangan berlama-lama, agar program2 positif bisa segera dijalankan
12. **Elpadrino Solitario.** Pengamat2 ini msh ngayal aja. sdh tahu sby kayak gitu masih mengharapkan yg mustahil....hahhahhahahah negeri para penghayal



Berita 3

Kamis, 13/10/2011 18:59 WIB

Proses Reshuffle Terlalu Panjang Bak Sinetron

Nurvita Indarini - detikNews

Wacana reshuffle sudah cukup lama bergulir dan menjadi konsumsi publik. Tidak heran jika kemudian ada yang menilai proses reshuffle ini seperti adegan-adegan dalam sinetron yang terdiri dari beberapa babak.

"Kalau menurut saya, proses reshuffle ini terlalu lama atau panjang bergulir dan juga terlalu panjangnya proses yang dipertontonkan presiden. Ini bak sinetron atau drama yang terdiri dari beberapa babak," kata peneliti politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yuda, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (13/10/2011).

Dia menambahkan, karakteristik SBY adalah sangat memperhatikan setiap proses, seolah ingin sempurna dan melibatkan publik. Namun di kaca mata Hanta, output dari proses tersebut terbukti tidak terlalu menggembirakan hasilnya.

"Nah itu, SBY tersandera oleh 'permainan' sendiri, karena terlalu lama. Panjangnya proses ini justru memberi ruang atau celah bagi manuver atau intervensi politik (terutama dari partai) yang justru akan mereduksi kekuasaan prerogatif presiden sendiri," tutur Hanta.

Kerugian dan lamanya isu reshuffle bergulir adalah munculnya spekulasi yang akan semakin liar karena ketidakjelasan parameter yang digunakan dalam evaluasi atau reshuffle. Jika parameternya kinerja, presiden sebenarnya sudah punya instrumen/unit kerja (UKP4), sehingga semestinya hal itu yang jadi basis utama.

"Tetapi itu tidak dibuka ke publik. Sementara prosesnya dibuat seolah-olah terbuka dan 'ingin' melibatkan publik," lanjut Hanta.

Selain hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), presiden juga memiliki pakta integritas yang menjadi kontrak para menteri ketika diangkat. Dengan demikian, semua instrumen sudah

ada semua. Tapi Hanta tidak begitu yakin, dua parameter itu yang dominan menjadi pertimbangan SBY saat melakukan reshuffle.

"Keyakinan saya, seperti pengalaman dua kali reshuffle di periode sebelumnya. Aspek politis justru paling kentara. Aspek politis lebih dominan yang menyebabkan tarik ulur dan lamanya proses di setiap reshuffle," tuturnya.

Dia melihat, presiden mempertimbangkan perimbangan kekuatan partai-partai di parlemen serta mengakomodasi keinginan para pengendali partai. "Jadi kalau ada menteri yang masih disokong kuat oleh partainya, apalagi kalau sang menteri orang kuat atau pengendali di partai, maka kecil kemungkinan kena reshuffle kendati pun bermasalah secara kinerja atau akseptabilitas dari publik," papar Hanta.

Sebelumnya dalam jumpa pers di kediamannya, SBY mengatakan kabinet yang dibentuk semacam kabinet kerja. Idealnya, mengingat reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun dalam politik riil ada etika koalisi dan kewajiban yang harus dilakukan.

"Karena itu meminta pandangan pemimpin parpol koalisi. Meski dari parpol, tapi punya kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik," kata SBY.

(vit/fay)

RESPON PUBLIK

1. **Auahgelapcoi.** Emang ngaruh sm org miskin ?? gaya gaya an ajeeee !! yg ngaruh hanya buat org kaya, pejabat, pemodal !! org miskin mah mau ganti menteri atau tdk ga ngaruh !! apa yg berasa !! malah hidup tambah payah !!!
2. **Sudar Madi.** Sepertinya presiden adalah orang yang ingin menyenangkan setiap orang.....
3. **Parhusip Patopa Nainggolan.** KAPAN KERJANYA JIKA BEGINI INI....
4. **Sutopobroto.** Selama ini apa kita gak tiap hari nonton sinetron KIB-II ????
5. **Indonesias Top.** Kalo tlatu pendek, bak apa ya, detik? Asal bukan bak mandi ja . . . he he he
6. **Amat Banyak.** Tambah 1 menteri lagi, MENTRI IMPOR, skarang kan pemerintah hobi impor brang dari luar.,,biarkan aja indonesia jdi pasar wat barang2 impor,,

Berita 4

Selasa, 18 Oktober 2011 (11:49 WIB)

Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY

Nurvita Indarini-*detikNews*

Jakarta - Seorang presiden tentu menginginkan stabilitas dalam pemerintahannya, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, SBY memerlukan dukungan publik dan dukungan parpol koalisi. SBY dinilai telah meramu politik pencitraan dan kompromi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"SBY ingin memenuhi keinginan publik tapi tidak berani melawan kungkungan parpol dalam koalisi. Maka itu saya kira diangkat sejumlah wamen agar partai bisa mengendalikan partai. Kavling menteri kebanyakan orang politik," kata peneliti politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (18/10/2011).

"SBY ingin mendapatkan dukungan rakyat dan parlemen. Politik pencitraan termasuk audisi menteri dilakukan untuk memuaskan rakyat melalui dukungan vertikal. Dukungan horizontal dengan menggunakan politik kompromi sehingga terlihat transaksional," imbuh Hanta.

Dia menambahkan, penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak terlalu kentara dalam melakukan reshuffle kabinet. Hanta juga melihat pakta integritas yang ditandatangani parpol juga kurang diperhatikan. Hal itu terlihat dari menteri yang diindikasikan bermasalah secara hukum belum diganti.

"Kenapa tidak buka saja evaluasi UKP4, karena proses ini perlu melibatkan publik, sehingga publik tahu mana yang kurang akuntabel, mana yang langgar atau mengarah melanggar secara politik meski secara hukum belum," tutur Hanta.

Penunjukkan wakil menteri juga dilihat Hanta sebagai politik main aman ala SBY. Tujuan penunjukkan wamen, sebenarnya baik yakni untuk menjaga kabinet meskipun ada risiko disharmoni antara menteri dan wakil menteri. Mendekati pemilu mendatang, bisa jadi menteri asal parpol koalisi akan turut berjibaku demi

kepentingan partainya, untuk menghindari hal itu perlu wamen untuk memastikan jalannya kabinet tetap aman.

"Menjelang pemilu nanti akan ada dualisme loyalitas. Wamen diperlukan untuk menjaga kabinet," imbuh alumnus UGM ini.

Hanta menambahkan, hingga saat ini posisi dan komposisi menteri Golkar di kabinet belum berubah, bahkan mungkin berpeluang bertambah. Pun dengan PKS dan PKB yang belum tersentuh. Pola reshuffle ini di mata Hanta masih memiliki pola yang sama dengan reshuffle yang pernah dilakukan SBY sebelumnya.

Ada kalkulasi kekuatan partai di parlemen dan perimbangan politik yang merupakan representasi partai atau daerah, evaluasi kedisiplinan atau manuver partai di koalisi, dan dinamika internal atau faksionalisasi di partai-partai koalisi. Di kalkulasi pertama, SBY selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah ketimbang dari non-parpol. Presiden tersandera oleh model permainannya sendiri.

"Soal kedua, yang paling bermanuver dulu era SBY-JK adalah Golkar, tetapi menariknya justru selalu mendapatkan tambahan kursi. Hal inilah yang berbeda perlakuan SBY terhadap PKS. Soal yang ketiga, SBY hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tidak kuat lagi di partai atau tidak didukung lagi oleh partainya," papar Hanta.

Dia mengimbuhkan, Golkar selalu diberi tambahan kursi di kabinet namun PKS justru terancam dikurangi jatah kursi menterinya. Alasannya, kalkulasi kekuatan parlemen. Sebab secara kuantitas Golkar 20% di parlemen, PKS hanya 10%.

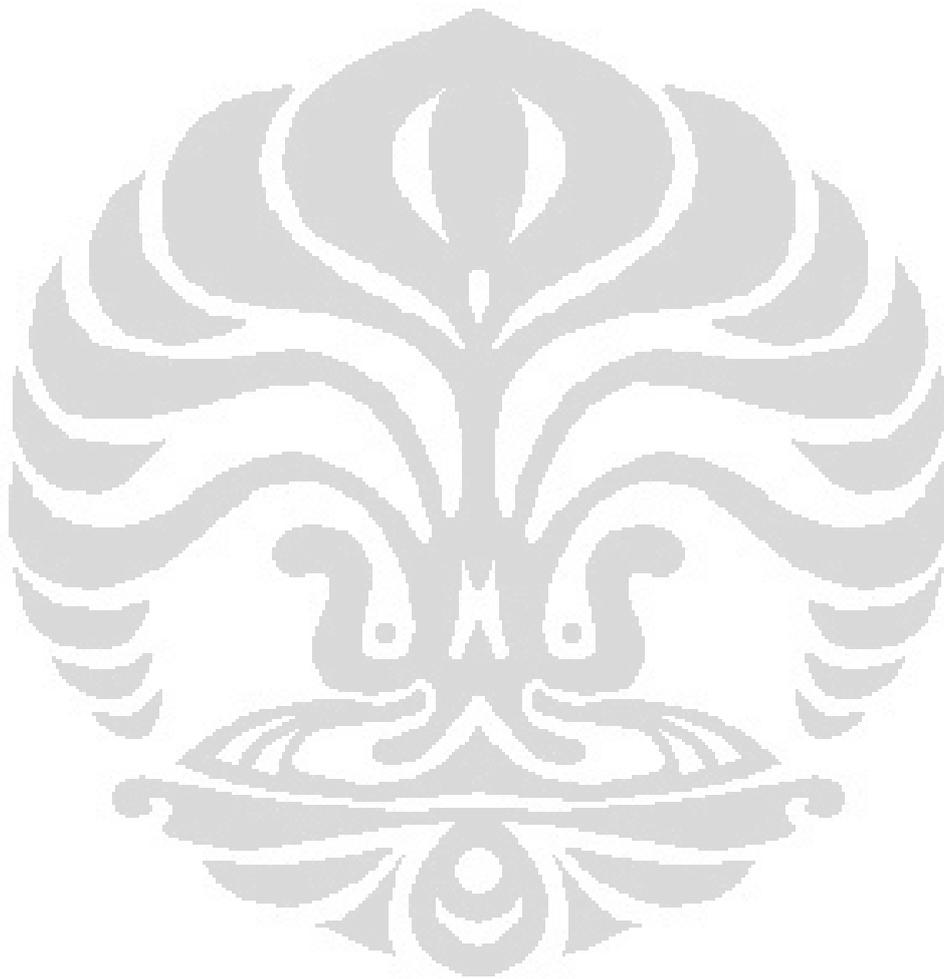
"Selain itu secara kualitas, politisi Golkar dianggap lebih piawai dan berpengalaman berpolitik ketimbang PKS. Tapi itu baru ancaman. Belum tentu juga SBY berani mengurangi jatah PKS. Kalaupun jadi, belum tentu juga, PKS berani keluar dari koalisi, meski jatah menterinya jadi tiga," ujar Hanta.

(vit/nwk)

RESPON PUBLIK

1. **Herlambang.** Waah KIB 2 kek 3 kek seperti sinetron tersanjung 1234 ampe jd tersandung 1234 kasihan rakyat indo para pemimpin diisi org2 yg ngakunya negarawan tp pada nyatanya lebih condong pd penghianat bangsa Ckck uang, kekuasaan Dan segalanya tidak kekal, bersatulah spt rakyat indo yg berjuang utk negara
2. **Handoko Halim.** Presiden SBY sangat lihay mengatur emosi rakyat, saat pilpres 2004; dia terpilih karena citra bukan kunerja, begitu juga 2009; saat ini rakyat sedang gencar2nya memperhatikan korupsi yg dilakukan kader2 Demokrat, supaya perhatian rakyat tdk terpusat kejahatan kader Demokrat, rakyat disuguhi sinetron yg memuakkan dan bertele tele reshuffell kabinet, sungguh sangat licik tindakan ini, Kasihan Indonesia
3. **Eisen Manullang.** Pengumuman Resuffle Kabinet tgl 18/10/2011 JAM 20.00 wib oleh Presiden SBY adalah Pilihan Presiden SBY antara Konsisten Menepati Janjinya Memberantas Korupsi atau Tunduk kepada keinginan Partai (=Soliditas Segab Koalisi) Presiden SBY dapat dikatakan Presiden Tega,karena lebih tega tidak melaksanakan Janjinya IPK 2014=5(Memberantas Korupsi), pada saat ini IPK 2010=IPK 2009=2,8.
4. **Run2000man.** Pak SBY, mohon dilantik juga mentri pembasmi koruptor g perlu ada wakil mentrinya. Cukup pasukan terlatih untuk menembak mati para tersangka koruptor. Kalau bisa lebih terlatih daripada Densus 88. Terima kasih
5. **Aman.damai66.** Presiden di era setelah order baru, kekuasaannya tdk kuat lagi karena kekuasaan sdh terbagi di banyak tempat Parlemen, Pers, LSM dll. Parlemen sangat kuat dan bahkan bisa mengancam ancam Presiden bila Parpolnya kehilangan kursi Menteri, itulah real politik, contoh Alm Presiden Gusdur dilengserkan oleh Parlemen (DPR) karena semua fraksi sdh sepakat melengserkan Alm Gusdur dari kursi Presiden, meskipun beliau sampai saat ini tdk dapat dibuktikan kesalahannya. Sebagai rakyat saya hanya mengharapkan para tokoh di RI ini bersama sama mampu menata ulang kembali suasana politik yg kondusif sehingga semua program Pemerintah utk kesejahteraan rakyat memperoleh dukungan sepenuhnya dari Parlemen.

6. **Jaguar Salim.** Kalau perlu nantinya ada empat wakil presiden di Indonesia, biar Indon bisa lebih maju mengejar ketertinggalan yg pemimpin nya sudah sangat lelet.
7. **Jambros.** Kabinet SONTOLOYO...reshuffle atau tidak, ada pemerintah atau tidak, ada parlemen atau tidak... rakyat tidak terlalu pusing. Mungkin sebaliknya mereka-mereka yang pusing kalau sudah tidak diperhatikan rakyat... apalagi SBY gila pengakuan...



Berita 5

Senin, 24 Oktober 2011 (11:58 WIB)

Bisakah Reshuffle Selamatkan SBY?

Tak Ada Harapan dari paradoks Presiden

Deden Gunawan - *detikNews*

Kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II benar-benar membuat kecewa Presiden SBY. Ia menyesal kepercayaan penuh yang diberikan kepada para menteri tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Ketua DPP PD bidang Bappenas Kastorius Sinaga menuturkan, selama dua tahun pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya, SBY telah memberikan kepercayaan penuh pada para menteri terutama yang berasal dari parpol koalisi.

Kini SBY menyesalinya karena ternyata kinerja mereka tidak baik. Bahkan SBY secara terbuka menyesali adanya gesekan antar menterinya. Lewat reshuffle nanti, SBY akan mengambil alih tongkat komando yang diberikan kepada menteri dari parpol koalisi tersebut.

"Kepada kami (PD) SBY secara langsung bilang akan mengambil alih tongkat komando di kementerian, terutama yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti Kemenkes, Kemendiknas, dan urusan alutsista," kata Kasto.

Setelah reshuffle nanti, SBY juga akan berada di garis depan dalam mencegah terjadinya perampokan APBN. Pendek kata, setelah reshuffle nanti, SBY akan melakukan perubahan yang radikal demi melecut kinerja kabinetnya.

Namun janji PD itu tidak bisa menghilangkan nada minor yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Banyak kalangan justru tidak yakin reshuffle akan memberikan perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja kabinet. SBY diprediksi tidak akan berani bersikap radikal melakukan perubahan.

Ia bakal akomodatif dalam melakukan reshuffle. Ia tidak akan berani mencopot sejumlah menteri meskipun sang menteri berkinerja buruk. Mengapa? Karena SBY ingin mempertahankan dukungan dari banyak pihak dan tidak ingin memiliki musuh setelah reshuffle.

"Sudah karakternya ingin menyenangkan semua pihak. Jadi sekalipun ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk, SBY tidak bakal berani mencopotnya," analisa pengamat politik Maswadi Rauf saat berbincang-bincang dengan detik+.

Indikasi SBY berupaya menyenangkan banyak pihak bisa terlihat dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerian. SBY tidak mencopot menteri yang kementeriannya tidak bekerja maksimal. SBY justru menempatkan wakil menteri.

Padahal jika mau tegas, SBY sebenarnya punya kewenangan memecat menteri sesuai keinginannya seperti dijamin undang-undang. Partai koalisi akan menerima pemecatan itu asal didasarkan penilaian yang jelas.

Sikap SBY yang berusaha hati-hati dalam mengganti menteri membuat proses reshuffle berjalan panjang dan menjadi gaduh. Bahkan untuk mencoret nama satu orang menteri saja SBY harus minta pendapat ke sejumlah pihak, terutama di lingkaran dekatnya.

"Ada satu orang menteri di bidang ekonomi yang menurut penilaian UKP4 kurang maksimal. SBY sempat ingin menggantinya. Tapi ketika orang di ring-1 tidak sependapat SBY batal mencoretnya," jelas sumber detik+ di lingkungan istana.

Namun sumber tersebut enggan menyebut nama menteri di bidang ekonomi yang sempat ingin didepak tapi kemudian 'diselamatkan' ring-1 Istana tersebut. "Tebak aja deh sendiri," begitu kata sang sumber.

Gaya kepemimpinan SBY yang terlalu banyak meminta pertimbangan termasuk dalam menjalankan pemerintahan membuat banyak kalangan menyalahkan SBY atas buruknya kinerja KIB II. Janji SBY yang akan menyetop perampokan APBN lewat reshuffle juga disangsikan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menganggap, pernyataan SBY paradoks dengan tindakannya. SBY mengatakan akan menyetop perampokan APBN, namun di satu sisi, ia justru mengangkat beberapa wakil menteri, yang tentunya akan menyedot dana APBN.

"Apa yang diucapkan SBY selama ini selalu paradoks dengan apa yang dilakukannya. Sejak awal pemerintahan saja, pemerintahan SBY sudah

melakukan pemborosan dengan membeli mobil-mobil mewah untuk para menteri di kabinetnya," kata Farhan.

Jika SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN seharusnya dalam pergantian menteri, SBY berpatokan pada audit BPK terhadap sejumlah kementerian. Yuna mencontohkan, dari hasil audit BPK terhadap beberapa kementerian, seperti Kemenakertrans dan Kemendiknas berstatus disclaimer. Terutama soal biaya perjalanan dinas di kementerian itu yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Aneh jika SBY justru tidak mengganti menteri-menteri yang duduk di kementerian tersebut. "Harusnya SBY mengambil sikap tegas kepada menteri-menteri yang di kementeriannya bermasalah dalam hasil audit BPK. Ini kalau SBY benar-benar ingin menyelamatkan APBN dari perampokan," tegasnya.

Karena ucapan SBY yang selalu paradoks dengan tindakannya, Fitra memprediksi perombakan menteri yang dilakukan SBY tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan 3 tahun mandating.

Tudingan karakter SBY sebagai penyebab buruknya pemerintahan tentu saja dibantah kubu presiden. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PD Ruhut Sitompul mengakui SBY memang ingin menyenangkan banyak pihak. Tapi, ia menegaskan bukan berarti karakter itu menyebabkan SBY tidak bisa bersikap tegas. Menurut Ruhut, SBY pasti dengan tegas akan mencopot menteri yang bermasalah.

"Selama 2 tahun KIB II, bapak SBY punya gambaran bagaimana kerja menteri-menterinya. Dan saat ini akan ada perubahan mendasar dari sikap bapak terhadap menteri-menteri yang tidak bisa kerja," ujar Ruhut.

(iy/vit)

RESPON PUBLIK

1. **Iwanosky.** Ada yang hanya pandai mengeritik ada yg merasa sangat pandai padahal ijazah pas-pas an.. ada merasa luar biasa bahkan lebih hebat dari presiden hanya bermodalkan warnet dan e-mail palsu.... maju terus bapak sby, kami menghormati apapun yg telah bapak lakukan.. maaf saya cuma orang biasa yg ingin menyebut nama bapak.. merdeka!
2. **Mbahmu69.** Era 2004-2009 SBY aman karena peran JK yang sangat dominan n proaktif, Boediono entah apa yang bisa dibuatnya bingung?, semua harus SBY yang nangani, manalah bisa sayangku??????
3. **Tengguli.** O..jadi selama ini presidennya melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Visi tidak jelas, pengarahan dan pemantauan dan evaluasi terus menerus tidak ada. Kalau begitu bukan presiden/pemimpin namanya. Tidak heran kalau selama ini beliau banyak waktu untuk mengarang lagu dan menyanyi. Aneh..
4. **Samson.roso.** Kecewa dg kerja menteri yg sdh dapat kepercayaan penuh ? Akan ambil komando di kementerian setelah resuffle ? Ini benar2 ucapan seorang pemimpin yg tdk bertanggung jawab. Tanggung jawab akhir pemerintah ada di presiden. Presiden harus monitor terus pencapaian setiap kementerian, memberikan arahan, menengahi konflik antar menteri termasuk menegur jika ada yg melenceng. Lha, apa selama ini menteri2 itu disuruh jalan sendiri ? Contoh kasus, Sea Games besok ini. Apa sby tdk malu fasilitas Sea Games yg belum rampung ? Emang itu tugas panitia dan Menpora, tapi ini kan forum internasional. Publik LN taunya Indonesia jadi tuan rumah. Lha, siapa presiden tuan rumah ? Apalagi PD korupsi di proyek ini.
5. **Mbah_Ronggo.** Jangan bicara soal fisik lah, banyak juga yang berbadan besar tetapi pemikiran dan tindakannya sebagai pemimpin bisa tajam dan akurat. Winstons Churchill itu tambun tapi kepemimpinannya selama PD II mengantarkan Inggris menang perang. Persoalannya sederhana, SBY bukan pemimpin yang bisa dibanggakan. Saya tahu memimpin itu tidak mudah, tetapi sekali anda di posisi itu anda harus menunjukkannya. Dan SBY sejauh ini belum menunjukkan kemampuan itu.

6. **Senoajie.** Rewrite DEWA87: Punya presiden ex militer diharapkan bisa tegas, tapi ini malah sebaliknya, lambat, banyak pertimbangan, tapi keputusannya gak tepat.
7. **Oding Supardi.** Gimana mau ada harapan wong presidenya boncos, gak punya harga diri, gak punya malu, cuma menang bongosor doang... Mudah-mudahan mereka masuk neraka semua, karena sudah menyengsarakan rakyatnya
8. **Anangdes.** Apapun dan siapapun yang berwacana terkait perihal termaksud sepanjang keadaan mendua yang sengaja terus dipertahankan, maka loyalitas ganda dan adanya friksi pasti tidak akan bisa dihindari dan sekecil apapun pasti ada. padahal sebagai pejabat publik dengan jabatan menko dan/atau menteri dalam kabinet ini adalah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari dan untuk negara, untuk itu seharusnya dan sebaiknya kepentingan/keanggotaan parpol harus berganti dengan baju seorang negarawan, itulah idealnya. pertanyaannya, apakah ada keberanian ?
9. **Annas Faturrochman.** Reshuffle itu memperlihatkan bahwa pemimpin nggak becus dan nggak pantas memimpin... bukan rakyat yang menilai tapi mereka (pemimpin) itu sendiri yang memperlihatkannya.. kalau memang mampu nggak bakalan ada reshuffle.. gitu aja kok repot...
10. **Dewa87.** Ah, reshuffle ato gak sama aja tuh, menteri2 yg diganti adlh menteri2 yg hampir tdk terkena masalah. Sedangkan, menteri2 yg terkena masalah, msh tetep dipertahankan. Apalagi mengangkat Wamen, itu sama saja menambah beban APBN, walopun wamen itu setara dgn pejabat eselon 1, tp ttp aja menyedot APBN. SBY selalu cari aman, gak berani mengambil resiko besar. Punya presiden militer diharapkan bisa tegas, tapi ini malah sebaliknya, lambat, banyak pertimbangan, tapi keputusannya gak tepat. Ah, bosen sama pemerintahan SBY. 2014 msh lama yah??? Pgn cepet2 ganti presiden nihhh...
11. **Nijmahurlaili.** Kemelut negeri ini terkait reshuffle yakin tidak akan usai. pasalnya permasalahan negeri ini ada di seluruh lini kehidupan. and harusnya yang diperbaiki bukan orang-orangnya saja. coba lihat lebih dalam, bisa jadi sistem yang menaunginya pun bobrok pula. so ingin negeri ini sejahtera? ganti orang n ganti sistem.